

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui penelitian ini penulis mencoba menjawab pertanyaan apa permasalahan yang dihadapi jurnalis terkait jurnalisme lingkungan dalam memberitakan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Berdasarkan peran media massa dan kerja jurnalisnya dalam meliput serta memberitakan masalah lingkungan khususnya kebakaran hutan yang sering terjadi di Riau, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana *problem* atau kendala yang dihadapi jurnalis dalam memberitakan masalah lingkungan khususnya kebakaran hutan dan lahan.

Dalam penelitian ini penulis memilih surat kabar lokal yang ada di Riau. Penulis memilih media cetak tersebut karena media cetak tersebut merupakan media cetak lokal yang sudah senior di Riau yang berdiri sejak tahun 1991 dan tentunya mempunyai kedekatan dengan permasalahan lingkungan yang terjadi di Riau.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan melalui wawancara mendalam terhadap tiga jurnalis SKH Riau Pos yang *intens* meliput kebakaran hutan dan lahan di Riau dapat disimpulkan bahwa dalam memberitakan kebakaran hutan di Riau, ketiga jurnalis tersebut menghadapi beberapa kendala atau *problem* secara umum yang dihadapi jurnlis pada umumnya dalam peliputannya dan hanya satu wartawan yang memiliki *problem* yang berkaitan dengan jurnalisme lingkungan.

Dari hasil wawancara dengan ketiga jurnalis dari SKH Riau Pos yang *intens* meliput kebakaran hutan di Riau yaitu Eka Gusmadi Putra, Muhammad Ali Nurman, dan Mario di tempat dan waktu yang berbeda dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang mereka hadapi dalam memberitakan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau tidak jauh berbeda satu sama lain, hanya ada satu perbedaan yang dialami jurnalis tersebut. Permasalahan yang mereka hadapi berkaitan dengan jurnalisme lingkungan terkait kewajiban sebagai seorang jurnalis lingkungan dan kinerja jurnalistik.

Secara umum permasalahan yang dihadapi adalah dari segi wilayah atau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Riau yang terlalu jauh untuk dijangkau. Untuk mencapai lokasi kebakaran tersebut membutuhkan waktu lama dan medan yang sulit untuk dilalui. Hal itu tentunya menjadi penghambat bagi wartawan untuk memperoleh berita aktual. Sehingga seperti yang dikatakan Andi Novirianti dalam penelitiannya bahwa objektivitas dan kedalaman berita yang ada di media lokal di Riau masih kurang memiliki objektivitas. Untuk mengatasi hal tersebut, agar berita-berita penting dari berbagai wilayah kebakaran itu tidak terlewatkan maka SKH Riau Pos telah mencari solusi dengan menempatkan wartawan kontributor pada setiap kabupaten dan menempatkan wartawan pada poskonya masing-masing untuk menggali lebih dalam informasi tersebut.

Masalah umum yang dihadapi tidak hanya itu saja, untuk mendapatkan data dari narasumber terkait juga ada beberapa kendala yang dihadapi oleh ketiga wartawan tersebut, meskipun tidak begitu signifikan. Hal ini

disebabkan karena ada narasumber yang terkadang tidak mau memberikan informasi atau kurang berkompeten dan sulit untuk ditemui, sehingga isi berita menjadi kurang lengkap karena menggunakan data seadanya. Namun disisi lain terlihat kemudahan wartawan dalam mendapatkan informasi terkait kebakaran hutan dan lahan di Riau. Kemudahan tersebut terlihat dari ada instansi terkait yang justru memberikan informasi dan data kepada wartawan, kemudian melakukan konfirmasi. Jika upaya konfirmasi tidak berhasil maka data seadanya yang ada ditangan wartawan tersebut yang dijadikan berita di SKH Riau Pos. Dari hal itu terlihat kedalaman informasi dalam pemberitaan tersebut menjadi kurang lengkap.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *problem* kerja atau kendala jurnalis SKH Riau Pos dalam meliput dan memberitakan kebakaran hutan dan lahan di Riau tidak memiliki *problem* kerja secara khusus dalam hal jurnalisisme lingkungan. Hanya ada satu wartawan yang dalam kerja jurnalistiknya memiliki *problem* yang berhubungan dengan kendala yang dialami jurnalis lingkungan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau.

B. Saran

Penelitian ini masih terdapat beberapa kelemahan. Penulis tidak bisa melakukan penelitian secara lebih efektif dan penulis kurang melakukan pendekatan dengan ketiga jurnalis yang menjadi subyek penelitian. Hal ini sangat berpengaruh pada hasil wawancara mendalam karena data yang diperoleh penulis menjadi kurang mendalam. Hal ini dikarenakan suatu faktor,

yaitu kesibukan pekerjaan mereka sebagai jurnalis, dan faktor lain yaitu peneliti belum bisa mengikuti kerja jurnalis secara langsung dengan efektif.

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi para pembacanya, civitas akademika, dan para calon peneliti yang juga berniat melanjutkan penelitian ini atau meneliti mengenai jurnalis lingkungan. Penulis berharap bagi calon peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian dengan meneliti kelompok jurnalis lingkungan yang lebih besar dari beberapa media, baik media lokal maupun nasional.

Penelitian tersebut diharapkan dapat dilakukan dalam waktu yang lebih lama, terutama dengan observasi, sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abrar, Ana Nadhya.1993. *Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press

Astraatmaja Atmakusumah, Maskum Iskandar dan Warief Djajanto Basorie, Penyunting. 1996. *Mengangkat Masalah Lingkungan ke Media Massa*. Jakarta: LPDS dan Yayasan Obor Indonesia.

Birowo, M. Antonius, dkk. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Gitanyali

Hester, L. Albert dan To, J. Wai Lan, Penyunting. 1997. *Pedoman Untuk Wartawan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Erlangga

Keraf, A. Sony. 2006. *Etika Lingkungan*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas

Kountur, Ronny. 2003. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Thesis*. Jakarta : PPM

Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Mulyana, Deddy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Noviriyanti, Andi. 2006. *Objektivitas Berita Lingkungan Hidup, Jurnalistik Berkelanjutan*. Riau : Yayasan Taman Karya Riau.

Nurudin. 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Rakhmad, Jalaludin. 1993. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Siregar, Ashadi.1998.*Bagaimana Meliput dan Menulis Berita Untuk Media Massa*. Yogyakarta: LP3Y

Sugiyono.2005.*Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung : Alfabeta

Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Penelitian :

Haswari, Aninda.2010. *Jurnalisme Lingkungan Dalam Pemberitaan Seputar Eksploitasi Hutan di Indonesia Pada SKH Kompas April-Mei 2010*.Yogyakarta.Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Paulina,Elizabeth.2010. *Jurnalisme Lingkungan Surat Kabar Indonesia: Studi Analisis Isi Pemberitaan Bencana Pergerakan Tanah Jawa Barat Pada Surat Kabar Kompas dan Pikiran Rakyat Periode Februari-Maret 2010*.Yogyakarta.Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Artikel Online

<http://m.riapos.co/33685-berita--mengurai-masalah-secara-komprehensif.html>

(diakses 10 September 2013).

www.riapos.co (diakses 10 September 2013)

Interview Guide

Dalam penelitian kualitatif ini metode utama yang digunakan adalah wawancara mendalam, Wawancara mendalam dilakukan kepada narasumber untuk memperoleh informasi mengenai topik penelitian yang dilakukan penulis. Narasumber dalam penelitian ini adalah jurnalis SKH Riau Pos yang meliput dan menulis berita terkait kebakaran hutan yang terjadi di Riau yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian.

Pertanyaan yang dilampirkan dapat dikembangkan sesuai dengan proses wawancara dengan narasumber. Pertanyaan yang diberikan kepada narasumber sesuai dengan teori yang digunakan yaitu, Jurnalisme Lingkungan dan Kinerja Jurnalistik. Berikut ini beberapa pertanyaan inti yang akan dilakukan untuk wawancara dengan narasumber :

Data Narasumber :

Nama :

Usia :

Asal :

Media :

Jabatan dalam media :

Lama bekerja :

Pendidikan Terakhir :

Pertanyaan berdasarkan teori yang digunakan diajukan untuk menjawab penelitian ini :

1. Bagaimana *problem* atau kendala kerja yang anda hadapi ketika menjalankan tugas jurnalistik, khususnya terkait kebakaran hutan dan lahan di Riau dilihat berdasarkan kewajiban yang harus dilakukan wartawan lingkungan ?
2. Bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang datang pada saat melaksanakan tugas sebagai seorang jurnalis lingkungan ?
3. Bagaimana solusi yang anda tawarkan terkait kasus-kasus lingkungan yang terjadi, berhubungan dengan kewajiban sebagai seorang jurnalis lingkungan?
4. Bagaimana peran serta Riau Pos dan Jurnalis Lingkungan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau yang dituntut untuk bersikap *fair* ?
5. Bagaimana cara Riau Pos menanggapi dan memahami permasalahan lingkungan khususnya kebakaran hutan dan lahan yang sudah sering terjadi di Riau ?
6. Bagaimana *problem* yang dihadapi jurnalis SKH Riau Pos terkait profesi jurnalis lingkungan ?
7. Bagaimana cara yang anda lakukan agar mendapatkan data yang akurat dari narasumber terkait kasus kebakaran hutan dan lahan ?
8. Bagaimana interaksi antara anda dengan redaksi terkait peliputan kebakaran hutan dan lahan ?

Transkrip Wawancara Mendalam dengan Jurnalis SKH Riau Pos (Mario)

P : Kemarin ngeliput seputar kebakaran hutan juga ?

W : Iya, kami biasanya tim. Kendalanya yang kami alami tu jauhnya medan, kebanyakan kebakaran hutan tu cenderung berada di daerah-daerah yang cukup jauh, misalkan kalau di Riau itu di kabupaten ROHIL, Bengkalis , Rohul, Siak. Jadi paling kendalanya di medan. Tapi kami untuk di Riau Pos sendiri biasanya menurunkan tim. Artinya begini untuk di propinsi kan kita punya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sama dinas terkait lah. Jadi mungkin kami berbagi tim. Kebetulan kalau saya tugasnya pada waktu itu ikut mengontrol di Badan Penanggulangan Bencana. Kawan-kawan ada yang di BMKG. Secara teknis kendala-kendala kalau untuk peliputan tidak begitu signifikan. Cuma jauhnya medan, sehingga kita lebih cenderung berkomunikasi lewat HP, Soalnya kan kita punya jaringan, di setiap kabupaten kota kita punya kontributor. Jadi untuk mengetahui informasi terbaru itu kita komunikasi (bagaimana kondisi terbaru? Bagaimana titik asap).

P : Bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan itu ?

W : Caranya kita mungkin kita koordinasi dengan tim-tim yang ada di daerah, di lapangan terus supaya dapat hasil yang lebih valid terkadang kita ikut sama instansi. Terkadang Badan Penanggulangan Bencana mengajak kita, sebagian wartawan juga ada ikut helicopter melihat kondisi asap, titik api. Sebagian juga ada langsung terjun dengan tim-tim yang memadamkan api, kita juga ikut. Kalo saya kemarin pernah ikut sama dinas perkebunan, soalnya di Riau kebanyakan yang terbakar selain hutan yang umum, juga ada perkebunan kelapa sawit, jadi mungkin saat itu kita koordinasi untuk mengatasinya dengan turun ke instansi-instansi terkait.

P : Solusi apa yang anda tawarkan terkait kebakaran hutan dan lahan ?

W : Mungkin kalau kami dari jurnalis itu permasalahannya, minimnya pengawasan, terus penerapan sanksi kurang tegas. Artinya kedepannya memang harus seluruh *stakeholder*, baik pemerintah, masyarakat, perusahaan, aparat penegak hukum harus mengoptimalkan pengawasan. Jadi api itu, asap lebih cepat ditangani sebelum membesar. Jadi ketika ada pengawasan, ada indikasi kebakaran hutan memang harus langsung. Yang kedua, untuk mengurangi efek jera, memang harus diberikan semacam *punishment* lah yang tegas, soalnya sebagian besar itu juga ada perusahaan terkait kebakaran hutan yang diberikan sanksi, sehingga mereka tidak lagi mengulangi pembakaran hutan untuk membuka lahan .

P : Bagaimana peran serta riau pos terkait kebakaran hutan dan lahan di Riau ?

W : Kalau Riau Pos ya tetap pada jalurnya. Kita memantau, melaporkan kondisi terkini, menginformasikan kondisi aktual. Terus memang ada juga sih kawan-kawan dari Jikalau Hari, WALHI, WWF itu juga turun, kita juga berkordinasi sama-sama, mencari informasi, melihat perkembangannya. Yang jelas kalau dari Riau Pos kita memberikan semacam pembelajaran. Soalnya peran media itu juga berperan memberikan pembelajaran pada masyarakat, pada seluruh pihak, bahwa memang asap ini sudah bikin masalah yang rutin. Jadi kasus kebakaran hutan itu penanganannya memang selalu telat. Jadi memang harus perlu kerjasama dengan pihak terkait.

P : Bagaimana cara Riau pos menanggapi dan memahami permasalahan terkait kebakaran hutan ?

W : Kalau Riau pos kan dari awal sudah mengedepankan prinsip yang jurnalisme akomodatif, artinya memang selalu setiap pihak itu dikonfirmasi, ditanyakan

kondisinya, penyebabnya. Kebakaran hutan ini kan sering terjadi, apakah ini akan terjadi lagi tahun depan. Gimana kedepannya lahan yang sudah terbakar. Itu yang kadang kita kaitin juga. Kita juga punya halaman minggu, namanya Liputan Khusus. Liputan khusus itu kita kupas penyebabnya, lokasinya, penanganannya, bagaimana kedepannya, apa yang harus dilakukan pemerintah, seluruhlah pihak terkait kita kupas itu, supaya masyarakat tau bahwa kita memang tidak mau men-*judge* diberita, bahwa ini yang salah. Kita paparkan aja, biarkan masyarakat menilai karena kita juga gak ingin satu pihak di *judge* .

P : Kalau Riau Pos sendiri *concern* dengan kasus-kasus lingkungan gak ?

W : Iya, kita di Riau Pos itu ada halaman namanya “*save the earth*” di hari Minggu, kita kupas itu, cuma memang itu masalah-masalah lingkungan seperti lahan gambut, efek rumah kaca dan segala macam terkait lingkungan. Masalah asap juga berkali-kali dikupas di halaman itu. Itu salah satu bukti kalau memang kami dari Riau Pos *concern* untuk bidang lingkungan hidup. Ada timnya juga yang mengupas masalah lingkungan.

P : Bagaimana *problem* yang dihadapi jurnalis SKH Riau Pos terkait profesi jurnalis lingkungan ?

W : Kalau *problem* secara prinsip gak begitu signifikan, soalnya mungkin kayak intervensi dari perusahaan bisa dikatakan tidak ada, karena memang kami seluruh pihak sering mendapat laporan dari LSM, Kebakaran hutan misalnya, lalu kami konfirmasi itu, ke *stakeholder*, masyarakat, jadi memang semua kami konfirmasi, sehingga berita yang kami beritakan itu memang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pertimbangan itu mungkin pihak perusahaan atau masyarakat gak bisa mengintervensi. Kami di lapangan sangat luas dalam melaksanakan tugas, artinya memang tidak ada beban. Untuk masalah asap ini, sampai ribut-ributnya, sampai presiden sempat *coment* memang jadi topik

utama di halaman depan selalu kami bahas. Ketika itu jadi *headline* dan di halaman depan, itu memang selalu dirapatkan (ohh ini lho yang harus dibahas, ini yg harus dikupas, gitu), jadi memang kami selalu membahas itu disesuaikan dengan isinya. Hampir dua bulan kalau gak salah asap itu dibahas terus.

P : Kalau untuk konfirmasinya sendiri ada kendala *gak* ?

W : Konfirmasi kebetulan kami di lapangan kan punya tim, kalau saya kebetulan kedatangan konfirmasi itu ke pihak pemerintah, artinya saya konfirmasi ke kepala daerah, sekretaris daerah, badan penanggulangan bencana, dinas kehutanan, badan lingkungan hidup. Teman-teman juga ada sebagian ke Gubernur, Bupati, Walikota, ke pihak terkait, pihak perusahaan. Jadi kalo untuk kendala konfirmasi kalo saya pribadi tidak begitu sulit, intinya kita, informasi ini kan kita peroleh dan kita komunikasikan dengan pihak-pihak terkait, sehingga mereka mau menyampaikan.

P : Bagaimana cara yang anda lakukan agar mendapatkan data yang akurat dari narasumber terkait kasus kebakaran hutan?

W : Ya memang kalau berbicara data kita harus valid, kalau melihat jumlah titik api, tu biasanya kami di posko. Di badan penanggulangan bencana itu ada posko. Tiap hari kita cari informasi, kalo *gak* kami dikasih *printout* data titik api di kabupaten kota, jumlah pesawat yang diturunkan, jumlah *bom water* yang sudah dilakukan. Sebagian kawan-kawan juga ada yang turun ke lapangan melihat kondisi asap, titik api dan itu nanti dirangkum menjadi satu berita *headline* atau *second headline*.

P : Bagaimana interaksi antara anda dengan redaksi terkait peliputan kebakaran hutan?

W : Ini sangat kuat, karena di Riau Pos untuk berita-berita *headline* memang selalu dibahas, pembahasannya itu mulai dari tingkat reporter, korlip dibahas, dirancang segala macamnya. Nanti usulan kami itu dibahas lagi di rapat redaksi, ada redaktur, redpel sampai ke pimrednya langsung. Itu dibahas apa topik yang menarik pada saat itu dan yang akan datang.

P : **Anda kan meliput kebakaran hutan juga, liputan itu atas perintah dari pimred atau inisiatif sendiri ?**

W : Kalau kami liputan kan di BB ada group, kami juga punya rapat harian antara jam lima sampai jam tujuh malam, kecuali hari libur dan hari minggu. Jadi saat rapat itu kita bahas sesuai dengan posko masing-masing, korlip biasanya menanyakan itu, bagaimana perkembangannya? apa kedepannya?. Usulan dari kami ini dibahas di rapat redaksi, itu liputan yang terencana. Tapi terkadang di lapangan ada suatu hal yang gak kita duga, misalnya, kita akan memprediksi akan mengambil data mengenai kebakaran hutan. Pada saat di lapangan ternyata kepala instansi atau pihak terkait mau turun, *nahh* itu kita langsung ikut kesana dan memantau. Dan setiap perkembangan yang kita peroleh di lapangan kita laporkan kemudian kita tindak lanjuti, kita tanya lagi ke pihak yang terkait. lebih ke *jobdeskripsi* yang diatur sedemikian rupa, sehingga memang data yang kita peroleh itu maksimal.

P : **Kalau dari jurnalisnya sendiri terkait kebakaran hutan, ikut berperan gak ?**

W : Kami mungkin harus tetap mengedepankan kode etik jurnalistik, artinya memang kami gak bisa ikut langsung, misalnya berkecimpung menyelidiki penyebabnya secara *detail* mungkin *enggak*. Tapi yang jelas kami sesuai dengan peran kami lah. Melihat informasi itu, mengapa bisa terjadi, siapa saja yang disana. Itu yang kami informasikan. Kalau untuk spesifik seperti kayak Jikalau Hari, WALHI, WWF mungkin kami *enggak lah*. Kami hanya sesuai

dengan peran kami, informasi kami kembangkan, memberi informasi kepada publik bahwa inilah kondisi *realnya*.

P : Kalau ini kan termasuk jurnalisme lingkungan, kalau dari istilah-istilah lingkungan sendiri dan dilihat dari sisi penulisan beritanya ada istilah lingkungan yang masih awam, pembaca belum tau, kalau menurut anda bagaimana cara penulisan yang tepat agar pembaca tau ?

W : Biasanya kalau di Riau Pos kalau ada bahasa inggris atau bahasa-bahasa awam, itu kita *bold*, digaris miring atau kami biasanya kasih keterangan dalam kurung, misalnya *booming water* (penyiraman air) hujan buatan, koma red. Intinya tidak mengurangi substansi berita yang kami informasikan.

P : Kemarin saya dapat informasi juga dari pak ilham kalo di Riau Pos *gak* ada wartawan yang khusus lingkungan, *nah* itu anda sendiri kan juga meliput tentang lingkungan mengerti *gak sih* tentang istilah-istilah lingkungan, atau pernah ikut seminar *gitu* ?

W : Kebetulan saya kan kuliah saya kan di Manajemen Sumber Daya Perairan, Magister saya di Ilmu Lingkungan UNRI, jadi sedikit banyaknya saya juga punya *basic* lah. Karena saya menggeluti ini, Cuma saya sering diskusikan juga sama orang kantor, sama teman-teman saya yang mengerti lah tentang spesifikasinya lingkungan. Yang jelas yang kita informasikan itu memang untuk masyarakat awam. Jadi untuk bahasa-bahasa yang terlalu teknis kita minimalisir itu, ketika memang sudah tidak bisa lagi di elakan dan harus disampaikan ya disampaikan dengan kaidah-kaidah yang ada. Ketika itu bisa kita olah menjadi bahasa-bahasa yang mudah dikenal masyarakat ya kita atur aja gitu.

P : *Ada gak sih* misi-misi atau tujuan tersendiri dari jurnalis lingkungan untuk memberitakan kebakaran hutan ?

W : Yang pasti, baik pribadi maupun instansi, kami dari Riau Pos, semangat kami memang selalu ingin di depan dari media-media yang lain, artinya memang kami selalu coba memberikan informasi pada masyarakat bahwa yang ini jangan sampai terulang lagi, artinya memang kita coba berfikir mengajak, bahkan kita selalu menyampaikan kepada instansi terkait itu kok ini terjadi lagi, selama ini kita dimana. jadi terkadang kami lebih ke pembelajaran kepada publik. Peran kami disana itu mengajak, lebih pada ke persuasife penanganannya, bagaimana kita meminimalisir ini jangan sampai terjadi lagi .

P : **Kalau dilihat dari fungsi media untuk informasi, edukasi dan mediator. Kalo dari wartawan sendiri bagaimana menjalankan tiga fungsi itu terkait kasus kebakaran hutan dan lahan?**

W : Kalau saya dan di tim juga melakukan hal yang sama. Terkait informasi kita lakukan, edukasi mungkin seperti itu yang kita berikan pembelajaran pada masyarakat, kalo mediasi, kita memang terkadang juga berperan mengajak bahwa pihak-pihak terkait itu terkadang ya terlepas dari peran kita sebagai jurnalis juga memberi masukan, kedekatan emosional kita sebagai narasumber, memberikan peluang kepada kita untuk memberikan masukan kepada mereka misalkan (pak kayaknya kita harus melibatkan ini lho).

P : **Ada *gak* pedoman kerja jurnalis dalam meliput berita lingkungan?**

W : Spesifik mungkin enggak, tapi kita lebih kepada aturan main di Riau Pos dan ini tidak berlaku di spesifik lingkungan, karena liputan yang masalah hukum, pendidikan paling ketika itu menjadi isu yang menarik kita bahas pertama, kita cari masukan dari berbagai pihak untuk dijadikan pertimbangan sehingga liputan itu lebih terarah .

P : Kalau berdasarkan datanya bagaimana wartawan menjaga akurasi keseimbangan objektivitas berita ?

W : Kami biasanya lebih ke *record* dan sebagian teman-teman menulis data, dan terkadang meminta data secara langsung, jadi data yang didapat akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk mengantisipasi itu paling sering kita *record* .

P : Kalau dilihat *gak* ada keberpihakan wartawan atau Riau Pos sendiri ke perusahaan atau ke masyarakat ?

W : Itu yang kami kedepankan. Kami memposisikan kami berada ditengah-tengah semuanya, baik perusahaan, masyarakat, pemerintah, penegak hukum dan aparatur. Jadi memang kami tidak mau men-*jugde* si A si B salah atau benar. Kami memaparkan kondisinya *real*-nya di lapangan, jadi masyarakat bisa menilai. Kami hanya memaparkan sesuai dengan fakta, sesuai dengan kondisi di lapangan dan sesuai dengan data yang kami peroleh. Terlepas dari masalah masyarakat menilai Si A si B salah itu bukan urusan kita, yang jelas kita melaksanakan tugas memberi informasi secara valid.

P : Itu kasusnya udah selesai ?

W : Alhamdulillah tim kasutla yang sudah pulang awal November udah selesai , hampir tiga bulan dia disini

P : Itu beritanya terakhir bulan apa ?

W : Kalau tidak salah awal November, pasca itu kita juga sering *running* tapi tidak se-*intens* biasanya, misalnya langkah antisipasi, langkah himbauan dari BMKG, pengawasan titik api .

Transkrip Wawancara Mendalam dengan Jurnalis SKH Riau Pos (Muhammad Ali Nurman)

P : Kapan kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi ? mohon diceritakan bagaimana kasusnya

W : Ada 3 orang yg diwawancarai ni, sekitar bulan Mei-Juni kebakaran hutan. Itu kami ada 3 orang yg *intens* meliput itu. Eka di poskonya, Mario di Pemprof (apa kebijakan Pemprof terkait itu), aku di masalah hukumnya, karena kebetulan aku ngeliputnya di hukum kriminal, di Polda, Kejari, Kejati. Jadi ketika terkait ini otomatis awalnya kan tentu yang dicari siapa yang bertanggung jawab terhadap ini ? Kita tanya sama polisinya, bagaimana pengembangannya, apalagi saat itu kan Kementerian Lingkungan Hidup melangsir ada 14 perusahaan yang harus bertanggung jawab. Itu kita tanya sama Polda. Polisi waktu itu belum menetapkan kalau perusahaan itu bersalah, polisi malah bertanya 14 itu siapa yang bilang ? Kementerian lingkungan hidup. Oiya kita akan dalam itu, kata mereka awalnya. Setiap hari kita pantau terus.karena kita kan sistemnya posko. Artinya selain berita itu kita jug harus produksi berita lain yg terkait posko kita. Tapi itu rutin ditanyatanya, akhirnya Polda Riau menetapkan satu perusahaan sebagai tersangka, PT Adei Plantation, tapi hanya perusahaanya saja, orangnya belum. Tapi saat itu kita tanya, kenapa bisa gitu? Artinya, perusahaan itu ada *personnya* yang menyerahkan kebijakannya, perusahaan ini kan lembaga. Lembaga tujuannya tidak ada yang tahu. Hanya sekitar jarak berapa bulanlah dari penetapan itu, akhirnya polda Riau mengirimkan penyidik dari Direktorat Criminal Khusus dari Jogja. Saksi ahli lah, dari saksi ahli ditetapkan dua orang tersangka yaitu GM (*General manager*). Sejauh ini dari dua orang itu satu baru yang ditahap

dua. Artinya berkasnya lengkap, tinggal menunggu penuntutan di pengadilan di Pelalawan.

P : Itu perusahaannya Indonesia atau perusahaan asing ?

W : Perusahaan asing, punya Malaysia kalau *gak* salah.

P : Kalau ngeliput kan butuh data yang benar-bener akurat dan valid, sebagai wartawan sendiri gimana sih biar cari data biar benar-bener valid, karena kan itu bakal di *publish* di koran dan dibaca orang banyak, gimana?

W : Kita sistemnya dari informasi yang di dalam, ada dua informasi yang kita dalam, apa kepastian tentang kasus. Ya itu tentang perusahaan, ada perusahaan yang kabarnya jadi tersangka, kita kejar. Kalau kami biasanya ke Humas Polda kordinasinya, bagaimana konfirmasinya. Tanyakan nama perusahaan nya. Berjalan, kabarnya dua orang ditetapkan tersangkanya. Kalau polisi kebiasaannya kan sebelum berkas ini masuk ke pengadilan mereka tidak pernah membuka ungkap-ungkap. Siapa nama panjang orang itu (latar belakangnya *gak* dibuka), paling hanya inisialnya siapa, warga Negara apa, umurnya berapa.

Karena mereka ini warga negara asing setelah dia tertangkap tentu ada yang mengikuti, yaitu dia di cekal, *nah* untuk mendapatkan data tentang dia, kita konfirmasi ke imigrasi, dari imigrasi lah ketauan nama lengkapnya.

P : Ada kesulitan *gak* mas buat dapat narasumber?

W : Kalau sejauh data biasanya kalau belum puas dengan satu narasumber, kita cari narasumber yang lain sebagai perbandingan.

P : Narasumbernya sendiri susah atau tidak untuk diwawancarai?

W : Sejauh ini *gak* susah, karena sistemnya sebenarnya posko, kecuali mungkin kalau wartawan nasional yang disini, dia kan sendiri, dia yang megang semuanya, berarti dia kesini, kemana-mana segala macam. Kalau kami, kayak PT ADEI PLANTATION yang ditetapkan sebagai tersangka ini kan daerah operasinya di Pelalawan otomatis kami yang di pekanbaru tidak memikirkan kondisi di Pelalawan bagaimna. Itu orang pelalawan lah yang tau.

P : **Kalau misalkan ni. kita butuh data tentang ini, tapi narasumbernya itu *gak* mau di wawancarai, susah ditemui, padahal kita benar-benar butuh, itu bagaimana ?**

W : Pertama, upaya konfirmasi kan harus ada, biasanya kita punya nomor kontaknya, kalau orangnya ditelepon, disms *gak* jawab, cari tau siapa yang megang kasusnya, karena semua bekerja berdasarkan fungsi tugasnya masing-masing, kalau masalah kebakaran hutan kan Direktorat Criminal Khusus di Polda Riau, pergi kesana gitu. Kalau *gak* dapat juga kita harus menjadikan kawan anggota-anggotanya, secara global *sih*, informasi bisa dari mereka juga. Kita tanya sama anggotanya (ini gmna?), hal ini harus dikonfirmasi (kabarnya ini *kayak* gini ya), kalau kita sudah punya data, kita tanyanya enak, masalahnya kalau kita *gak* punya data, kalau kita tanya ya bakalan gitu, ada pertentangan kerja lah. Kalau wartawan mau buka seluas luasnya kan, kalau polisi membuka seperlunya saja.

P : **Berarti intinya ada *kroscek* lagi dengan narasumber lain?**

W : Ya intinya seperti itu, fungsinya dasar aja *sih* sebenarnya memang.

P : **Jadi untuk mengatasi kesulitan itu, tanya kontakannya, langsung hubungi,. kalau dari anda sendiri, solusi yang ditawarkan apa terkait kasus kebakaran hutan dan lahan ?**

W : Harusnya dievaluasi perusahaan-perusahaan yang ada disini, artinya kalau sudah misalnya kayak perusahaan dijadikan tersangka, otomatis kan ada keputusan bersama, artinya perusahaan yang dianggap salah ini bukan orangnya saja, kan ada dua proses ni :

Perusahaan ditetapkan jadi tersangka, artinya secara *general* ini perusahaan salah, setelah itu baru ditetapkan dua pimpinan jadi tersangka kan, artinya keberadaan perusahaan ini kan dievaluasi.

P : **Itu sebenarnya kebakaran hutan itu karena sengaja dibakar atau karena kebakar karena panas?**

W : Jadi kasus kebakaran di Riau kemaren ini, perusahaan nya cuma satu dan itu satu-satunya sampai sekarang jadi tersangka. Ada tersangka-tersangka perorangan, kalo di cari ada tu. Kalo data aku *gak* hafal, tapi ada. Rata-rata mereka membuka lahan, membuka lahan kalau dengan tata cara umum sekian ratus hektar kan biaya akan mahal. Maka pakai jalan cepat lah mereka, *bakar* aja pakai minyak, disiram.

P : **Kalo dari Riau Posnya sendiri ikut berperan *gak* terkait kasus ini, misalkan menawarkan solusi apa gitu?**

W : Sebenarnya fungsi media itu harus bisa menawarkan solusi, tapi kan tidak secara langsung medianya yang *ngomong*, kita cari siapa orang yang berkompeten untuk itu. Kan bisa minta buah pikiran dari ahli, misalnya pakar lingkungan, lalu kita suguhkan ke masyarakat, siapapun lah nanti masyarakat yang membaca itu. Karena kan diantara pihak-pihak yang berwenang terhadap masalah kebakaran hutan ni kan tidak langsung berkomunikasi, dinas kehutanan misalnya, kan tidak langsung berkomunikasi dengan kapolda. (ada mungkin yg mau disampaikan dinas kehutanan tentang solusi ini tp tidak bisa langsung ke kapolda, lalu melalui siapa? Ya sudah melalui media saja, gitu.).

P : Kalau Riau Pos sendiri menanggapi permasalahan lingkungan kebakaran hutan dan lahan ini gimana ?

W : Ini penting, malah sampai beberapa terbitan jadi halaman satu terus. Sampai akhirnya ada wartawan Riau Pos yang angkat tentang kebakaran hutan ini, juara tiga di lomba penulisan di KLH itu, redaktur dia. Itu penting karena untuk masyarakat dan isunya sudah nasional dan bencana nasional. Makanya harus ada yang disangkakan . kalau Cuma orang per orang tidak akan separah itu asapnya. Maka dicarilah siapa yang bertanggung jawab terhadap itu.

P : Itu yang dibakar daerah mana aja ?

W : *Searching* dulu. Itu isu besar, *gak* akan orang per orang yang menggarap , intinya kerja tim.

P : Kalau dari sisi penulisan beritanya sendiri, ini kan jurnalisme lingkungan, kan banyak pembaca yang masih kurang *ngerti* tentang ada bahasa-bahasa yang mungkin masih belum dimengerti orang, itu bagaimana cara mengatasinya agar pembaca *ngerti* ?

W : Wartawan itu harus mengerti dulu apa yang dia tulis, bentuk sederhana dalam masalah itu yang paling dimengerti masyarakat. Harus seperti itu dikemasnya.

P : Kalau di Riau Pos sendiri, ada *gak* wartawan yang khusus tentang lingkungan? *nah* kalau anda sendiri kan ini tentang kebakaran hutan otomatis kan ada istilah-istilah lingkungan yang mungkin agak kurang dimengerti, pernah dapat *kayak* misalkan pelatihan khusus *gak* tentang jurnalisme lingkungan ?

W : *Gak sih*, Cuma ya kita harus proaktif, cari tau apa yang tidak kita tau, kita cari tau sendiri (*googling*).

P : Kalau berita tentang kebakaran hutan nya sendiri tu sekarang sudah *gak* muncul, tapi yang penetapan tersangkanya itu yang masih muncul atau tidak ?

W : Iya, karena tidak ada masa kadaluarsanya, penyidikan itu kan berproses, penuntutan sampai di persidangan.

P : Sekarang juga msih berlanjut ?

W : Masih, karena diantara dua orang ini, baru satu yang berkasnya lengkap untuk penuntutan.

P : Kalau untuk menulis berita-berita lingkungan ada kesulitan *gak* ?

W : Sulit itu kan tergantung persepsi kita aja sebenarnya, anggap aja tantangan. Gambarannya, kita kan harus bertanggung jawab untuk memberikan informasi pada masyarakat, gimana caranya kita harus *ngerti*. Kalau kita *gak ngerti*, gimana kita bisa buat masyarakat *ngerti*.

P : Kalau kasus kebakaran hutan dan lahan, anda liputan atas inisiatif sendiri atau perintah dari pimred ? hubungan antara wartawan dengan pimrednya itu gimana ?

W : Ya *kayak* aku bilang tadi, kita ini kan penugasan berdasarkan prosedur. kebetulan kasus ini kan ada kaitan dengan masalah hukum, artinya kebakaran hutan ini kan masalah artinya ada pidana yang mengikutinya, pidana itu kan bisa dikenakan kepada siapa saja, yang menangani ya penegak hukum kan, polisi, jaksa. Itu aku liputannya langsung aja ke polda. Setiap hari kita kan *nyari* informasi ni. Aku rasa tidak harus diperintah lah. Cuma ada informasi kita kejar. Karena kan informasi itu bisa dari mana saja. Bisa kita dapat dari narasumber, bisa dari kabar angin yang belum dapat dipastikan dari bocoran-

bocoran. Kalau aku *gak* terlalu banyak *sih*, Cuma mantau masalah hukumnya saja.

P : **Saat ini masih liputan tentang kasus itu ?**

W : Iya mantau terus, Cuma terakhir minggu lalu baru ditahap dua kasusnya, berkasnya lengkap untuk penuntutan.

P : **Disini lagi liputan apa ? (POLRES)**

W : Lagi buat berita, kalau ke kantor jauh. Kalau tugas jurnalistiknya *tu* sama aja *sih* sebenarnya , objek peliputannya aja yang berbeda-beda

P : **Kalau anda sendiri ikut *gak* turun ke lapangan, memantau kebakaran hutan ?**

W : *Gak*, karena kita terikat posko, kalau kita pergi siapa yang jaga posko? Sementara ada kewajiban membuat berita lain juga. satu hari paling tidak 5-6 berita minimal dan harus berita yang berbeda.

P : **Ada *deadline* juga ?**

W : Iya, *deadline* sore, setiap hari. Karena Riau pos itu terbitnya ada 44 halaman.

P : **Itu kebakarannya kan udah sering, selama sering terjadi kebakaran itu selalu ngeliput tentang kebakaran *gak*?**

W : Aku jadi wartawan baru tiga tahun, baru satu kali kemaren yang besar-besaran, yang ikut liputan ini ya baru kali ini. kalau yang ke lokasi kebakaran cuma yang kecil-kecil, sekitar kota, polisi kan ada juga bantu turun,naik mobil *water canon* itu, kalau yang posko penanggungjawabnya langsung kan mereka pakai helikopter. Ya bekerja sesuai fungsi aja. Kalau aku mantau masalah hukum kriminalnya. kalau terus mantau kesana, kan sudah ada Eka, sudah ada *jobdesknya* masing-masing.

P : Sebelum kerja di Riau pos kerja dimana ?

W : Sebelum itu kuliah, aku sama Eka sama masuk Riau posnya. Kalau wartawan baru sih awalnya *gak* langsung di tempatkan di Polda, *kayak* aku awalnya di polsek-polsek. Wartawan harus punya jaringan yang luas, jadi dia tau. Kita wawancara pun tidak bisa langsung, kita harus tanya kan ulang, apakah orang tersebut yang menangani kasusnya. Kalau dilihatnya kita tidak cakap, dia menghindar-menghindar. Karena kita wawancara cari tau dulu sama teman-teman wartawan. lalu kita telepon aja, (pak mau tanya masalah ini), kalau itu kewenangan dia, pasti akan langsung dijawab, tapi kalau itu bukan kewenangan dia, pasti dia akan jawab, itu tidak kewenangan saya. Kalo instansi itu pasti ada Humas, yang awal tu pasti kita ke Humas, tanya tentang masalah ini, mau jumpa dengan orang yang terkait dengan hal ini.

P : Kalau misalkan itu kasus kewenangan dia, tapi dia *gak* mau *ngasih* informasi, bagaimana?

W : oo bagus sekali, ada yang ditutupi itu pasti masalah. Masalah ini kita mau tanyakan tentu kita sudah punya latar belakang. Kita coba kontak dia. Ditelepon *gak* jawab, disms *gak* balas, ya udah untuk konfirmasi kita buat itu. Masalahnya berita kita kan hak jawabnya nanti ada. Kita kejar dia bukan karena hak dia pribadi tapi karena itu kewenangan dia, atas dasar tugas dan jabatan dia, makanya dia pun harus menjawab. Rata-rata pejabat sekarang sudah banyak yang *ngerti*, walaupun dia belum siap (nanti dulu ya atau tunggu sebentar aku cari informassi lengkapnya).

Kalau *kayak* kami di Riau pos itu ada jurnalisme akomodatif, kita mengakomodir orang, artinya sesalah apapun orang, diaanya harus ditanya apa sebenarnya permasalahannya. Karena permasalahan itu kan tidak muncul dari ruang hampa, berita yang menjual itu kan berita masalah.

P : Kalau anda sendiri pernah *gak ngalamin* seperti itu, misalnya *nyari* orang tapi *gak* bisa ditemui terus ditulis seperti tadi, tapi narasumbernya itu protes dan menggunakan hak jawabnya?

W : Ada yang marah-marah aja, karena diberitakan, *gak* ada hak jawab, ya udah *gak* apa-apa.

P : Ada *gak* yang sampai nuntut karena pemberitaannya tidak benar ?

W : Sampai somasi belum pernah sejauh ini.

P :Kalau Riau Pos sendiri lebih pro kemana *sih* dalam hal pemberitaannya?

W : Kita akomodatif, mengakomodir.

P : Kalau mau liputan kan ada persiapan-persiapan tersendiri, dari mulai liputan sampai berita dikirim. Itu ada persiapan khusus *gak* saat akan meliput berita kebakaran hutan ini ?

W : Setiap pagi kebiasaan wartawan tu baca-baca, apa yang bagus, informasi sekecil apapun dalami-dalami. Persiapannya paling, mulai bekerja dengan pikiran yang jernih.

Transkrip Wawancara Mendalam dengan Jurnalis SKH Riau Pos (Eka Gusmadi Putra)

P : Kapan kebakaran hutan dan lahan itu terjadi ?

W : Awal Juni, ya awal Juni karena *dah* kemarau kan

P : Beritanya muncul mulai bulan Juni sampai kapan mas ? bisa diceritakan awal kasusnya?

W : Awal Juni, *dah* mulai kemarau awal-awal itu *kan*. Itu mulai banyak lahannya kebakar. Itu pakai puntung aja udah kebakar *kan* karena lahan-lahan di Riau ini lahannya *kan* gambut, jadi itu dimanfaatkan sama ini, sama orang yang buka lahan untuk perkebunan. Kebanyakan sawit, terus karet. Jadi ada yang perorangan ada yang perusahaan memang. Cuman mereka memanfaatkan orang gitu untuk membakar.

P : Itu memang sengaja dibakar gitu ?

W : Itu ada yang disengaja. Itu tadi yang buka lahan. Makanya sampai sekarang *kan* masih ada beberapa tersangka. Terus dari awal Juni, pertengahan Juni itu mulai terasa kabutnya. Aku karena baru buat kaledoskopnya jadi masih sedikit ingat. Waktu 21 Juni pokoknya ributlah . Tanggal-tanggal belasan, 17, 18 dah mulai anak-anak sekolah *diliburin*, terus data Dinas Kesehatan juga sudah banyak masyarakat yang terserang ISPA, itu sudah merata diseluruh kabupaten kota di Riau.

Tanggal 20 *kan* pemberitaan di Singapore mulai menentang SBY tu *kan*, *dah* mulai sampai Malaysia, Singapore, Filipina dan sebagian Thailand *kan*. Terus dari 21 disini rapat. Semua *tu*, Wakil Gubernur, Danrem, Danlanud, Kapolda. Jadi ditetapkan waktu itu tanggap darurat asap *kan* statusnya itu. Sorenya

habis rapat itu, tiga menteri kesini langsung *tu*, Gamawan, Agung Laksono sama Menteri pertanian Kuswono, sama kepala BNPB. Dari situ mulai dibuka posko disana, di Lanud TNI AU Roesmin Nurjadin namanya. Disitu ada posko, *nah* disitu ada penanganan bom air, terus teknologi modifikasi cuaca sampai 20 hari.

P : **Itu kebakarannya di daerah mana aja mas ?**

W : Hampir seluruh Kabupaten *tu*, Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan, Pekanbaru, Siak, lebih ke arah sini sih, ke pesisir. Cuman setelahnya menyebar juga Inhu (Indra Giri Hulu), Inhil (Indra Giri Hilir), Kampar, Kuansing.

P : **Masnya juga ikut terjun langsung ke lapangan ?**

W : Sempat ikut yang nyemai garam itu *kan*, yang ikut bikin hujan buatan, terus sempat turun ke Pelalawan juga, ya beberapa kali lah. Tapi yang jelas *stanbay* di posko penanggulangan bencana itu di TNI AU, karena beritanya harus rutin *kan*, harus di *follow up* terus, dari hasil penanganannya *gimana sih*, dari yang titik api awalnya tanggal 20 sampai 90an *kan*, semakin nurun, terus tanggal 5 udah mulai nol titik apinya, 5 Juli.

Tapi beres Juli ,masuk Agustus, pertengahan Agustus ada lagi, kebakar lagi. Itu lebih banyak di Pelalawan, Inhu sama Bengkalis, Siak. Itu sempat ada penanganan. Iya ini yang paling parah *kan* dari 2007. Sampai ke Malaysia juga *kan*. Ya kayak ada siklus *gitu*, siklus lima tahunan hehehehe. Ya mungkin *entah iya entah* tidak terlepas dari unsur politiknya, jadi bergening politik itu *kan* untuk buka lahan. *Emang* kebakaran juga, cuman *emang* yang paling parah. Jadi *kayak* Pelalawan yang dekat aja *kan* , mulai dari gerbang masuk itu sudah kebakar semua, Rohil juga. Kebetulan juga waktu itu kata BMKG asap itu mengarah ke Singapore, sampai ke Malaysia.

P : Bagaimana permasalahan yang dihadapi ketika menjalankan tugas jurnalistik, khususnya terkait kebakaran hutan di Riau?

W : Dari awal *emang* sudah kendala *sih*, kenapa? Karena poskonya di AU. *Kan* tau wartawan sama TNI AU *kan* pernah dulu waktu Sukhoi jatuh, pesawat tempur itu jatuh. Sejak itu hubungan sudah tidak baik. Masuk saja kami harus diperiksa dengan tepat, KTP ditinggal, *ngisi* absen. Itu kendala awal. Tapi karena dari BNPBnya ini menjadi isu nasional, BNPB yang *back-up* untuk berangkat mau nyemai. Cuman waktu itu *ngebom ndak* bisa, karena terbatas *kan*, karena helikopternya sendiri bawa beban air 2000an liter, kalau kendala peliputan herkulesnya sendiri *kan*, herkules ketinggiannya *kayak gitu*. Kita *gak* pernah *kan*, karena diatas *kan* nyari awan yang benar-benar awan bisa dijadiin hujan. Jadi naik *ni* 1500 misalnya *kan*, *gak* ketemu awannya, naik lagi sampai ketempat yang kekurangan udara gitu. Itu kalau di udaranya.

Kalau di lapangannya pasti medannya, karena cenderung pemadaman itu tidak yang dipinggir jalan *kan* itu, harus masuk kedalam, karena hawanya sendiri udah panas.

P : Masnya sendiri pernah masuk *gak* ?

W : Iya, kami pernah investigasi sama fotografer

P : Itu *kan* sulit banget, bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan yang datang pada saat melaksanakan tugas sebagai seorang jurnalis lingkungan ?

W : Sebenarnya kebakaran hutan dan lahan tugas sebagai peliput juga gitu, yang juga ditugasi kantor, ya *kayak* ke lapangannya gitu ya bisa diatasi aja *sih*. Paling memang tidak sebentar, butuh waktu. Misalnya *gak* bisa selesai hari ini, konfirmasi lagi ke kantor belum dapat bahannya terus *nginap* dulu gitu. Minta waktu aja *sih*.

P : Karena ada *deadline-deadline* gitu ya ?

W : Iya, paling bahan seadanya sampai disitu aja, paling konfirmasi terbatas aja sama kepala BPPD sini *by phone* gitu.

P : Ini *kan* termasuk jurnalisme lingkungan *kan* ya. Kalau dari dari jurnalisme lingkungannya sendiri ada *problemnya* *gak*? *Kan* *gak* secara umum, misalnya kayak politik sendiri, *kan* beda-beda kesulitannya. Kalau di lingkungan sendiri ada kesulitan tersendiri *gak* saat *ngeliput*?

W : Dari lingkungan, kesulitannya kita *ngadepin* asap, rentan dengan Ispa. Pada waktu itu indeks Ispu itu sudah jauh di atas dari yang awalnya 230 standarnya, ini sudah sampai 350-400. Dan bukan untuk pribadi juga, tapi untuk Riau keseluruhan, untuk flora dan faunanya juga. Masyarakatnya juga memang sudah tercemar. Kementerian Lingkungan Hidup juga langsung turun waktu itu *kan* .

P : Kalau dari sisi penulisannya sendiri, itu *kan* ada istilah-istilah khusus juga *kan* kalau di lingkungan, seperti Ispa, Ispu. Itu *gimana* ?*kan* ada tu pembaca yang kurang *ngerti* tentang istilah-istilah gitu, *nah*, masnya sendiri *gimana* nulisnya biar pembaca itu *ngerti* maksudnya ?

W : Ya kalau misalnya bahasa awam *gak* apa-apa *kan* dituliskan langsung. Cuma kalau ada istilah dari lingkungan hidup atau dari tulisan mengenai itu, paling dikasih penjelasan aja setelahnya. Misalnya Ispu itu tadi, ya dijelasin aja beberapa kata gitu, Ispu itu apa *sih* gitu, kenapa lahan gambut itu mudah terbakar, dan segala macam. Paling kalau aku *gak* tau istilah itu artinya apa dan narasumber tidak bisa jelasin pada saat itu juga, paling ya *searching*, karena memang banyak bahasa baru.

P : Untuk jurnalisme lingkungan sendiri ada pelatihan khususnya *gak* mas, *kan* itu tadi ada bahasa-bahasa awamnya?

W : Untuk pelatihan khusus seperti itu tidak ada. Cuma kalau seminar atau worksop gitu mengenai lingkungan yang diadakan oleh BKSDA sering ikut.

P : **Jadi sedikit *ngerti* lah ya tentang istilah-istilah gitu ?**

W : Sedikit memahami. Ya itu tadi kalau benar-benar belum *ngerti* dan belum paham ya *googling*.

P : **Bagaimana solusi yang ditawarkan terkait kasus-kasus lingkungan yang terjadi, khususnya kebakaran hutan dan lahan yang belum lama ini terjadi di Riau?**

W : Emang harus ada regulasi yang jelas sebenarnya untuk masyarakat atau perusahaan yang membuka lahan gimana *sih* gitu. Misalnya mereka punya areal 1000 hektar gitu, yang untuk penanamannya 500 hektar. Cara untuk membuka lahan itu harus jelas gitu. Harus ada regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Perkebunan, semuanya harus bersinergi gitu. Jadi dengan gitu kan, kata Siswono juga kan waktu itu ada cara lain untuk membuka lahan selain membakar, tidak dengan membakar gitu. Bisa dengan menggunakan alat berat dan segala macam. Cuma kan kendalanya bagi perusahaan atau masyarakat yang pengen berkebun itu, biayanya jauh lebih mahal. Kalau pakai api kan tinggal siram aja pakai bensin habis. Tapi kalau ada regulasi kan bisa jelas, Polda juga bisa nindak tegas. Karena rata-rata dari belasan tersangka dalam kebakaran kemarin itu perusahaan Malaysia, makanya kalau Riau sendiri menangani ini gak mungkin bisa. Ini butuh sinergi dari semua kementerian.

P : **Sekarang masih berlanjut *gak* kasusnya itu ?**

W : Masih, sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka

P : **Kalau kebakarannya sendiri masih ada atau tidak ?**

W : Untuk kebakarannya sendiri sudah tidak ada, kan musim hujan. Tapi untuk Riau sendiri sudah ada kemajuan sih. Karena kemarin sudah disahkan juga perda tentang bencana alam. Dari perda itu nanti Riau sendiri sebelum musim kemarau, sebelum kebakaran itu sendiri terjadi bisa dilakukan penanganan. Lewat sosialisasi atau penjelasan kepada perusahaan untuk tidak membuka lahan dengan membakar. Baru disahkan kemarin 25 November.

P : **Itu beritanya terakhir bulan apa mas ?**

W : Ya yang 10 Juli posko ditutup , terus udah mulai pelacakan tersangka, titik api sudah *gak* ada. Di pertengahan Agustus kebakaran lagi, tapi bukan yang di lokasi pertama. Pindah lokasi kebakarannya.

P : **Pertengahan Agustus sampai kapan ?**

W : Sampai 31 Agustus, karena kan BNPB masih pakai helicopter. *Dah* masuk September udah *gak* ada lagi, curah hujan udah mulai turun lagi

P : **Bagaimana peran serta Riau Pos dan Jurnalis Lingkungan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau ?**

W : Ya perannya paling sebagai media kontrol sosial , memberitakan saja dan memang kami selalu menempatkan itu di halaman satu, di *headline*. Terus kan Riau Pos dibaca oleh masyarakat, pejabat, segala macam. Dari situ aja sih berharap *follow up*nya terus. Kan karena grup Jawa Pos, jadi yang besar-besarnya tetap dinaikkan di JPNN, selain di *online* dan di Koran. Kan isunya menyangkut SBY, pasca dia minta maaf sama Singapore.

P : **Riau Pos sendiri *concern* gak sama masalah-masalah lingkungan ?**

W : Ya *concern*. Tiap minggu kan kita siapkan halaman *save the earth*. Tiap minggu kan ada itu.

P : Setiap minggu pasti ada ?

W : Ada, pasti ada. Semua tentang lingkungan. Ada tim minggunya.

P : Anda sendiri ikut nulis di halaman *save the earth* gak ?

W : *Nggak*. Senin sampai Kamis *tu* dia keliling, Jumat, Sabtu baru *deadline*.

P : Bagaimana cara Riau Pos menanggapi dan memahami permasalahan lingkungan khususnya kebakaran hutan dan lahan yang sudah sering terjadi di Riau ?

W : Lewat pemberitaan aja *sih* sebenarnya. Tapi tim minggu juga setiap mereka bergerak ke lapangan itu selalu mengajaklah. Mengajak perusahaan agar tetap peduli. Karena kan kalau tidak ada peran media juga akan jauh lebih parah *sih*.

Karena gampang benar disini dirusak. Kalau ada kemarau ya udah, tinggal lempar puntung rokok aja bisa kebakar ribuan hektar kalau *dibiarin*. Satu lagi keterbatasan Riau juga kemarin, *gak* ada peralatan yang cukup, jadi harus minta bantuan.

P : Kalau di Riau Pos ada *gak* jurnalis yang khusus lingkungan ?

W : Paling ya tim minggu, karena yang harian tiap tahun pindah-pindah. Harus *nguasain* semua. Gak ada wartawan khusus. Paling yang ada ya wartawan budaya. Kalau lingkungan ya lihat situasinya aja. Kalau memang *scopenya* propinsi ya aku.

P : Bagaimana cara yang dilakukan agar mendapatkan data yang akurat dari narasumber terkait kasus kebakaran hutan dan lahan ?

W : Ya gerak ke ini aja, ke BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), terus ke BLH (Badan Lingkungan Hidup), yang punya data itu *sih* dua itu,

sama dinas perkebunan dan kehutanan. Kalau misalnya pengen data tentang ISPU minta ke lingkungan hidup. Pengen minta tentang data yang terserang ISPA misalnya minta ke kesehatan, gerak-gerak gitu aja.

P : Itu mereka *ngasih* atau ada kesulitan-kesulitannya untuk *dapetin* data itu ?

W : Ada, kadang banyak alasan untuk yang berkompeten memberi informasi itu tidak ada, nanti telepon kepala dinasnya aja.

P : Wawancara via telepon gitu ?

W : Telephone, minta arahan kepada kepala dinasnya, minta data kemana *ni*, biar dia yang delegasikan. Kalau udah kepalanya yang bilang kan, udah ikut aja orang. Karena kalau minta Gubernurnya kan, waktu itu gubernurnya di KPK, jadi wakilnya. paling kalo *mentok* gak dapat, sementara *deadline*, minta ke wakil gubernur.

P : Itu pasti dikasih atau tidak ?

W : Dari gubernur dimintakan ke anggota-anggotanya.

P : Wakil gubernur itu pasti mau untuk diwawancarai ?

W : Kalau untuk yang kasus Karhutla kemarin ya mau. Kalau isu publik biasanya mereka mau *ngasih*.

P : Jadi *gak* terlalu banyak kendala ya ?

W : *Nggak*, BMKG juga untuk titik api mereka mau *ngasih*

P : Anda sendiri *kan* ikut *ngeliput* kebakaran hutan dan lahan, itu perintah dari pimred atau inisiatif sendiri untu meliput ?

W : Untuk turun di lapangan seringnya inisiatif. Karena kan pasokan berita harus tetap terjaga. Inisiatif aja. Misalnya bang aku ikut nyemai ya, beritanya gimana? Aman

P : **Jadi *gak* harus diperintah untuk liputan ?**

W : *Nggak*, yang jelas jaga posko aja, kalau isunya propinsi ya itu kewenangan ku. Selesai liputan langsung kirim berita *by email*, *gak* mesti ke kantor. Kalau lagi liputan gini ada rapat kan *gak* mungkin ke kantor. Apalagi kalau yag di Pelalawan kan *gak* mungkin ikut rapat.

P : **Rapatnya mingguan atau gimana ?**

W : Rapatnya sebenarnya tiap hari. Cuman ya itu tadi kalau kita *gak* bisa ke kantor ya tinggal bilang aja karena liputan *gak* bisa ke kantor, berita kirim aja.

P : **Kalau kebakaran yang sebelumnya ikut *ngeliput* juga ?**

W : Kalau kebakran yang 2012 aku *gak ngurusi*. Ya itu tadi, kita dipindah-pindahin tiap tahun biar menguasai semua, *gak* ada yang khusus, yang tim minggu juga. *Kayak* aku gitu, udah *ngerasain* semua posko, nanti ditarik tim minggu. Itu kan ada liputan khusus juga, ada liputan *for us* juga.

Ya kendalanya itu aja, ya sebagai jurnalis juga sebenarnya *gak* ada yang bisa jadi kendala. Kalau *gak* bisa narasumber yang ini, cari narasumber lain. Kalau *deadline* memang datanya Cuma segini ya kita bilang nanti bisa di *follow up* lagi.

P : **Sebelum liputan ada persiapan-persiapan khusus *gak sih*? Misalnya mau kemana, mau wawancara siapa, cari data kemana. Dari persiapan liputan sampai pengiriman beritanya ada kendala *gak* ?**

W : Kita lihat isu hari sebelumnya sama hasil rapat sore, jadi bisa tau. Kalau misalnya *gak* ada *moment* besar. *Follow up* yang hari ini. misalnya hari ini di halaman satu atau halaman pro otonomi itu masalah pembatasan lima desa, misalnya *gak* ada penjelasan, *follow up* aja ke propinsi.

P : **Kalau kebakaran hutan kemarin dari Juni, Juli, Agustus, itu liputannya setiap hari atau gimana ?**

W : Ya setiap hari. Ya *progress* penanganannya lah ya, terus misalnya hari ini berapa yang di bom, hasilnya, terus besok rencananya kemana, gimana hasil seminggu. Terus dilihat dari aspek lain, lingkungannya gimana, sudah berapa yang terbakar, *follow upnya* gimana. Gitu aja *sih* kalau peran Riau Posnya sendiri.

P : **Jadi hampir setiap hari berita kebakaran muncul di *headline* ya ?**

W : Iya, dari tanggal 20 Juni samapai tanggal 5 Juli lah, sekaligus fotonya.

P : **Fotografernya ikut juga atau anda sendiri ?**

W : Ya fotografernya ada.

P : **Kalau Riau Pos kan media lokal. Biasanya ada kedekatan tersendiri pada masyarakat Pekanbaru, Riau. Gimana *sih* biar masyarakat itu percaya dengan pemberitaan Riau Pos? dari sisi penulisan beritanya sendiri gimana, kan masyarakat butuh banyak informasi perkembangan kasus kebakaran hutan dan lahan?**

W : Ya ini aja *sih*, menyajikan berita yang *real*. Kan pernah turun di lapangan, jadi tau menyajikan berita menurut masyarakatnya aja gimana. Bagaimana *ngerasain* kebakaran hutan. kan sampai ada korban kan, sampai ada yang meninggal. Ya turun ke lapangan terus. Ya menyajikan tulisan yang

menunjukkan empati lah ya dalam penulisannya. Mencoba di posisi masyarakat. Terus diambil *statement* dari pemerintah untuk penanganannya.

P : ***Gak* berpihak ke salah satunya ?**

W : *Gak*. Ya itu juga gunanya turun ke lapangan, tau kondisi *realnya*. Karena *omongan* pejabat, *omongan* tim di posko itu kan yang oke-oke aja kan, gimana *realnya* di lapangan mereka *gak* mau menyebutkan. Selain itu juga karena Riau Pos punya wartawan diseluruh kabupaten, jadi penyajiannya bisa berimbang. 12 Kabupaten kota ada.

P : **Kalau disini sendiri ada berapa wartawannya ?**

W : Pekanbaru yang di lapangan ada belasan. *Gak* sampai 15 sih. Pemberitaan satu wilayah bukan aku sendiri, tapi keroyokan. Tapi yang konsen di posko aku. *Kayak* yang di Polda ya harus *follow up* yang disana.

Interview Guide

Dalam penelitian kualitatif ini metode utama yang digunakan adalah wawancara mendalam, Wawancara mendalam dilakukan kepada narasumber untuk memperoleh informasi mengenai topik penelitian yang dilakukan penulis. Narasumber dalam penelitian ini adalah jurnalis SKH Riau Pos yang meliput dan menulis berita terkait kebakaran hutan yang terjadi di Riau yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian.

Pertanyaan yang dilampirkan dapat dikembangkan sesuai dengan proses wawancara dengan narasumber. Pertanyaan yang diberikan kepada narasumber sesuai dengan teori yang digunakan yaitu, Jurnalisme Lingkungan dan Kinerja Jurnalistik. Berikut ini beberapa pertanyaan inti yang akan dilakukan untuk wawancara dengan narasumber :

Data Narasumber :

Nama :

Usia :

Asal :

Media :

Jabatan dalam media :

Lama bekerja :

Pendidikan Terakhir :

Pertanyaan berdasarkan teori yang digunakan diajukan untuk menjawab penelitian ini :

1. Bagaimana *problem* atau kendala kerja yang anda hadapi ketika menjalankan tugas jurnalistik, khususnya terkait kebakaran hutan dan lahan di Riau dilihat berdasarkan kewajiban yang harus dilakukan wartawan lingkungan ?
2. Bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang datang pada saat melaksanakan tugas sebagai seorang jurnalis lingkungan ?
3. Bagaimana solusi yang anda tawarkan terkait kasus-kasus lingkungan yang terjadi, berhubungan dengan kewajiban sebagai seorang jurnalis lingkungan?
4. Bagaimana peran serta Riau Pos dan Jurnalis Lingkungan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau yang dituntut untuk bersikap *fair* ?
5. Bagaimana cara Riau Pos menanggapi dan memahami permasalahan lingkungan khususnya kebakaran hutan dan lahan yang sudah sering terjadi di Riau ?
6. Bagaimana *problem* yang dihadapi jurnalis SKH Riau Pos terkait profesi jurnalis lingkungan ?
7. Bagaimana cara yang anda lakukan agar mendapatkan data yang akurat dari narasumber terkait kasus kebakaran hutan dan lahan ?
8. Bagaimana interaksi antara anda dengan redaksi terkait peliputan kebakaran hutan dan lahan ?

Transkrip Wawancara Mendalam dengan Jurnalis SKH Riau Pos (Mario)

P : Kemarin ngeliput seputar kebakaran hutan juga ?

W : Iya, kami biasanya tim. Kendalanya yang kami alami tu jauhnya medan, kebanyakan kebakaran hutan tu cenderung berada di daerah-daerah yang cukup jauh, misalkan kalau di Riau itu di kabupaten ROHIL, Bengkalis , Rohul, Siak. Jadi paling kendalanya di medan. Tapi kami untuk di Riau Pos sendiri biasanya menurunkan tim. Artinya begini untuk di propinsi kan kita punya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sama dinas terkait lah. Jadi mungkin kami berbagi tim. Kebetulan kalau saya tugasnya pada waktu itu ikut mengontrol di Badan Penanggulangan Bencana. Kawan-kawan ada yang di BMKG. Secara teknis kendala-kendala kalau untuk peliputan tidak begitu signifikan. Cuma jauhnya medan, sehingga kita lebih cenderung berkomunikasi lewat HP, Soalnya kan kita punya jaringan, di setiap kabupaten kota kita punya kontributor. Jadi untuk mengetahui informasi terbaru itu kita komunikasi (bagaimana kondisi terbaru? Bagaimana titik asap).

P : Bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan itu ?

W : Caranya kita mungkin kita koordinasi dengan tim-tim yang ada di daerah, di lapangan terus supaya dapat hasil yang lebih valid terkadang kita ikut sama instansi. Terkadang Badan Penanggulangan Bencana mengajak kita, sebagian wartawan juga ada ikut helicopter melihat kondisi asap, titik api. Sebagian juga ada langsung terjun dengan tim-tim yang memadamkan api, kita juga ikut. Kalo saya kemarin pernah ikut sama dinas perkebunan, soalnya di Riau kebanyakan yang terbakar selain hutan yang umum, juga ada perkebunan kelapa sawit, jadi mungkin saat itu kita koordinasi untuk mengatasinya dengan turun ke instansi-instansi terkait.

P : Solusi apa yang anda tawarkan terkait kebakaran hutan dan lahan ?

W : Mungkin kalau kami dari jurnalis itu permasalahannya, minimnya pengawasan, terus penerapan sanksi kurang tegas. Artinya kedepannya memang harus seluruh *stakeholder*, baik pemerintah, masyarakat, perusahaan, aparat penegak hukum harus mengoptimalkan pengawasan. Jadi api itu, asap lebih cepat ditangani sebelum membesar. Jadi ketika ada pengawasan, ada indikasi kebakaran hutan memang harus langsung. Yang kedua, untuk mengurangi efek jera, memang harus diberikan semacam *punishment* lah yang tegas, soalnya sebagian besar itu juga ada perusahaan terkait kebakaran hutan yang diberikan sanksi, sehingga mereka tidak lagi mengulangi pembakaran hutan untuk membuka lahan .

P : Bagaimana peran serta riau pos terkait kebakaran hutan dan lahan di Riau ?

W : Kalau Riau Pos ya tetap pada jalurnya. Kita memantau, melaporkan kondisi terkini, menginformasikan kondisi aktual. Terus memang ada juga sih kawan-kawan dari Jikalau Hari, WALHI, WWF itu juga turun, kita juga berkordinasi sama-sama, mencari informasi, melihat perkembangannya. Yang jelas kalau dari Riau Pos kita memberikan semacam pembelajaran. Soalnya peran media itu juga berperan memberikan pembelajaran pada masyarakat, pada seluruh pihak, bahwa memang asap ini sudah bikin masalah yang rutin. Jadi kasus kebakaran hutan itu penanganannya memang selalu telat. Jadi memang harus perlu kerjasama dengan pihak terkait.

P : Bagaimana cara Riau pos menanggapi dan memahami permasalahan terkait kebakaran hutan ?

W : Kalau Riau pos kan dari awal sudah mengedepankan prinsip yang jurnalisme akomodatif, artinya memang selalu setiap pihak itu dikonfirmasi, ditanyakan

kondisinya, penyebabnya. Kebakaran hutan ini kan sering terjadi, apakah ini akan terjadi lagi tahun depan. Gimana kedepannya lahan yang sudah terbakar. Itu yang kadang kita kaitin juga. Kita juga punya halaman minggu, namanya Liputan Khusus. Liputan khusus itu kita kupas penyebabnya, lokasinya, penanganannya, bagaimana kedepannya, apa yang harus dilakukan pemerintah, seluruhlah pihak terkait kita kupas itu, supaya masyarakat tau bahwa kita memang tidak mau men-*judge* diberita, bahwa ini yang salah. Kita paparkan aja, biarkan masyarakat menilai karena kita juga gak ingin satu pihak di *judge*.

P : Kalau Riau Pos sendiri *concern* dengan kasus-kasus lingkungan gak ?

W : Iya, kita di Riau Pos itu ada halaman namanya “*save the earth*” di hari Minggu, kita kupas itu, cuma memang itu masalah-masalah lingkungan seperti lahan gambut, efek rumah kaca dan segala macam terkait lingkungan. Masalah asap juga berkali-kali dikupas di halaman itu. Itu salah satu bukti kalau memang kami dari Riau Pos *concern* untuk bidang lingkungan hidup. Ada timnya juga yang mengupas masalah lingkungan.

P : Bagaimana *problem* yang dihadapi jurnalis SKH Riau Pos terkait profesi jurnalis lingkungan ?

W : Kalau *problem* secara prinsip gak begitu signifikan, soalnya mungkin kayak intervensi dari perusahaan bisa dikatakan tidak ada, karena memang kami seluruh pihak sering mendapat laporan dari LSM, Kebakaran hutan misalnya, lalu kami konfirmasi itu, ke *stakeholder*, masyarakat, jadi memang semua kami konfirmasi, sehingga berita yang kami beritakan itu memang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pertimbangan itu mungkin pihak perusahaan atau masyarakat gak bisa mengintervensi. Kami di lapangan sangat luas dalam melaksanakan tugas, artinya memang tidak ada beban. Untuk masalah asap ini, sampai ribut-ributnya, sampai presiden sempat *coment* memang jadi topik

utama di halaman depan selalu kami bahas. Ketika itu jadi *headline* dan di halaman depan, itu memang selalu dirapatkan (ohh ini lho yang harus dibahas, ini yg harus dikupas, gitu), jadi memang kami selalu membahas itu disesuaikan dengan isinya. Hampir dua bulan kalau gak salah asap itu dibahas terus.

P : Kalau untuk konfirmasinya sendiri ada kendala *gak* ?

W : Konfirmasi kebetulan kami di lapangan kan punya tim, kalau saya kebetulan kedatangan konfirmasi itu ke pihak pemerintah, artinya saya konfirmasi ke kepala daerah, sekretaris daerah, badan penanggulangan bencana, dinas kehutanan, badan lingkungan hidup. Teman-teman juga ada sebagian ke Gubernur, Bupati, Walikota, ke pihak terkait, pihak perusahaan. Jadi kalo untuk kendala konfirmasi kalo saya pribadi tidak begitu sulit, intinya kita, informasi ini kan kita peroleh dan kita komunikasikan dengan pihak-pihak terkait, sehingga mereka mau menyampaikan.

P : Bagaimana cara yang anda lakukan agar mendapatkan data yang akurat dari narasumber terkait kasus kebakaran hutan?

W : Ya memang kalau berbicara data kita harus valid, kalau melihat jumlah titik api, tu biasanya kami di posko. Di badan penanggulangan bencana itu ada posko. Tiap hari kita cari informasi, kalo *gak* kami dikasih *printout* data titik api di kabupaten kota, jumlah pesawat yang diturunkan, jumlah *bom water* yang sudah dilakukan. Sebagian kawan-kawan juga ada yang turun ke lapangan melihat kondisi asap, titik api dan itu nanti dirangkum menjadi satu berita *headline* atau *second headline*.

P : Bagaimana interaksi antara anda dengan redaksi terkait peliputan kebakaran hutan?

W : Ini sangat kuat, karena di Riau Pos untuk berita-berita *headline* memang selalu dibahas, pembahasannya itu mulai dari tingkat reporter, korlip dibahas, dirancang segala macamnya. Nanti usulan kami itu dibahas lagi di rapat redaksi, ada redaktur, redpel sampai ke pimrednya langsung. Itu dibahas apa topik yang menarik pada saat itu dan yang akan datang.

P : **Anda kan meliput kebakaran hutan juga, liputan itu atas perintah dari pimred atau inisiatif sendiri ?**

W : Kalau kami liputan kan di BB ada group, kami juga punya rapat harian antara jam lima sampai jam tujuh malam, kecuali hari libur dan hari minggu. Jadi saat rapat itu kita bahas sesuai dengan posko masing-masing, korlip biasanya menanyakan itu, bagaimana perkembangannya? apa kedepannya?. Usulan dari kami ini dibahas dirapat redaksi, itu liputan yang terencana. Tapi terkadang di lapangan ada suatu hal yang gak kita duga, misalnya, kita akan memprediksi akan mengambil data mengenai kebakaran hutan. Pada saat di lapangan ternyata kepala instansi atau pihak terkait mau turun, *nahh* itu kita langsung ikut kesana dan memantau. Dan setiap perkembangan yang kita peroleh di lapangan kita laporkan kemudian kita tindak lanjuti, kita tanya lagi ke pihak yang terkait. lebih ke *jobdeskripsi* yang diatur sedemikian rupa, sehingga memang data yang kita peroleh itu maksimal.

P : **Kalau dari jurnalisnya sendiri terkait kebakaran hutan, ikut berperan gak ?**

W : Kami mungkin harus tetap mengedepankan kode etik jurnalistik, artinya memang kami gak bisa ikut langsung, misalnya berkecimpung menyelidiki penyebabnya secara *detail* mungkin *enggak*. Tapi yang jelas kami sesuai dengan peran kami lah. Melihat informasi itu, mengapa bisa terjadi, siapa saja yang disana. Itu yang kami informasikan. Kalau untuk spesifik seperti kayak Jikalau Hari, WALHI, WWF mungkin kami *enggak lah*. Kami hanya sesuai

dengan peran kami, informasi kami kembangkan, memberi informasi kepada publik bahwa inilah kondisi *realnya*.

P : Kalau ini kan termasuk jurnalisme lingkungan, kalau dari istilah-istilah lingkungan sendiri dan dilihat dari sisi penulisan beritanya ada istilah lingkungan yang masih awam, pembaca belum tau, kalau menurut anda bagaimana cara penulisan yang tepat agar pembaca tau ?

W : Biasanya kalau di Riau Pos kalau ada bahasa inggris atau bahasa-bahasa awam, itu kita *bold*, digaris miring atau kami biasanya kasih keterangan dalam kurung, misalnya *booming water* (penyiraman air) hujan buatan, koma red. Intinya tidak mengurangi substansi berita yang kami informasikan.

P : Kemarin saya dapat informasi juga dari pak ilham kalo di Riau Pos *gak* ada wartawan yang khusus lingkungan, *nah* itu anda sendiri kan juga meliput tentang lingkungan mengerti *gak sih* tentang istilah-istilah lingkungan, atau pernah ikut seminar *gitu* ?

W : Kebetulan saya kan kuliah saya kan di Manajemen Sumber Daya Perairan, Magister saya di Ilmu Lingkungan UNRI, jadi sedikit banyaknya saya juga punya *basic* lah. Karena saya menggeluti ini, Cuma saya sering diskusikan juga sama orang kantor, sama teman-teman saya yang mengerti lah tentang spesifikasinya lingkungan. Yang jelas yang kita informasikan itu memang untuk masyarakat awam. Jadi untuk bahasa-bahasa yang terlalu teknis kita minimalisir itu, ketika memang sudah tidak bisa lagi di elakan dan harus disampaikan ya disampaikan dengan kaidah-kaidah yang ada. Ketika itu bisa kita olah menjadi bahasa-bahasa yang mudah dikenal masyarakat ya kita atur aja gitu.

P : *Ada gak sih* misi-misi atau tujuan tersendiri dari jurnalis lingkungan untuk memberitakan kebakaran hutan ?

W : Yang pasti, baik pribadi maupun instansi, kami dari Riau Pos, semangat kami memang selalu ingin di depan dari media-media yang lain, artinya memang kami selalu coba memberikan informasi pada masyarakat bahwa yang ini jangan sampai terulang lagi, artinya memang kita coba berfikir mengajak, bahkan kita selalu menyampaikan kepada instansi terkait itu kok ini terjadi lagi, selama ini kita dimana. jadi terkadang kami lebih ke pembelajaran kepada publik. Peran kami disana itu mengajak, lebih pada ke persuasife penanganannya, bagaimana kita meminimalisir ini jangan sampai terjadi lagi .

P : **Kalau dilihat dari fungsi media untuk informasi, edukasi dan mediator. Kalo dari wartawan sendiri bagaimana menjalankan tiga fungsi itu terkait kasus kebakaran hutan dan lahan?**

W : Kalau saya dan di tim juga melakukan hal yang sama. Terkait informasi kita lakukan, edukasi mungkin seperti itu yang kita berikan pembelajaran pada masyarakat, kalo mediasi, kita memang terkadang juga berperan mengajak bahwa pihak-pihak terkait itu terkadang ya terlepas dari peran kita sebagai jurnalis juga memberi masukan, kedekatan emosional kita sebagai narasumber, memberikan peluang kepada kita untuk memberikan masukan kepada mereka misalkan (pak kayaknya kita harus melibatkan ini lho).

P : **Ada *gak* pedoman kerja jurnalis dalam meliput berita lingkungan?**

W : Spesifik mungkin enggak, tapi kita lebih kepada aturan main di Riau Pos dan ini tidak berlaku di spesifik lingkungan, karena liputan yang masalah hukum, pendidikan paling ketika itu menjadi isu yang menarik kita bahas pertama, kita cari masukan dari berbagai pihak untuk dijadikan pertimbangan sehingga liputan itu lebih terarah .

P : Kalau berdasarkan datanya bagaimana wartawan menjaga akurasi keseimbangan objektivitas berita ?

W : Kami biasanya lebih ke *record* dan sebagian teman-teman menulis data, dan terkadang meminta data secara langsung, jadi data yang didapat akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk mengantisipasi itu paling sering kita *record* .

P : Kalau dilihat *gak* ada keberpihakan wartawan atau Riau Pos sendiri ke perusahaan atau ke masyarakat ?

W : Itu yang kami kedepankan. Kami memposisikan kami berada ditengah-tengah semuanya, baik perusahaan, masyarakat, pemerintah, penegak hukum dan aparatur. Jadi memang kami tidak mau men-*jugde* si A si B salah atau benar. Kami memaparkan kondisinya *real*-nya di lapangan, jadi masyarakat bisa menilai. Kami hanya memaparkan sesuai dengan fakta, sesuai dengan kondisi di lapangan dan sesuai dengan data yang kami peroleh. Terlepas dari masalah masyarakat menilai Si A si B salah itu bukan urusan kita, yang jelas kita melaksanakan tugas memberi informasi secara valid.

P : Itu kasusnya udah selesai ?

W : Alhamdulillah tim kasutla yang sudah pulang awal November udah selesai , hampir tiga bulan dia disini

P : Itu beritanya terakhir bulan apa ?

W : Kalau tidak salah awal November, pasca itu kita juga sering *running* tapi tidak se-*intens* biasanya, misalnya langkah antisipasi, langkah himbauan dari BMKG, pengawasan titik api .

Transkrip Wawancara Mendalam dengan Jurnalis SKH Riau Pos (Muhammad Ali Nurman)

P : Kapan kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi ? mohon diceritakan bagaimana kasusnya

W : Ada 3 orang yg diwawancarai ni, sekitar bulan Mei-Juni kebakaran hutan. Itu kami ada 3 orang yg *intens* meliput itu. Eka di poskonya, Mario di Pemprof (apa kebijakan Pemprof terkait itu), aku di masalah hukumnya, karena kebetulan aku ngeliputnya di hukum kriminal, di Polda, Kejari, Kejati. Jadi ketika terkait ini otomatis awalnya kan tentu yang dicari siapa yang bertanggung jawab terhadap ini ? Kita tanya sama polisinya, bagaimana pengembangannya, apalagi saat itu kan Kementerian Lingkungan Hidup melangsir ada 14 perusahaan yang harus bertanggung jawab. Itu kita tanya sama Polda. Polisi waktu itu belum menetapkan kalau perusahaan itu bersalah, polisi malah bertanya 14 itu siapa yang bilang ? Kementerian lingkungan hidup. Oiya kita akan dalam itu, kata mereka awalnya. Setiap hari kita pantau terus.karena kita kan sistemnya posko. Artinya selain berita itu kita jug harus produksi berita lain yg terkait posko kita. Tapi itu rutin ditanyatanya, akhirnya Polda Riau menetapkan satu perusahaan sebagai tersangka, PT Adei Plantation, tapi hanya perusahaanya saja, orangnya belum. Tapi saat itu kita tanya, kenapa bisa gitu? Artinya, perusahaan itu ada *personnya* yang menyerahkan kebijakannya, perusahaan ini kan lembaga. Lembaga tujuannya tidak ada yang tahu. Hanya sekitar jarak berapa bulanlah dari penetapan itu, akhirnya polda Riau mengirimkan penyidik dari Direktorat Criminal Khusus dari Jogja. Saksi ahli lah, dari saksi ahli ditetapkan dua orang tersangka yaitu GM (*General manager*). Sejauh ini dari dua orang itu satu baru yang ditahap

dua. Artinya berkasnya lengkap, tinggal menunggu penuntutan di pengadilan di Pelalawan.

P : Itu perusahaannya Indonesia atau perusahaan asing ?

W : Perusahaan asing, punya Malaysia kalau *gak* salah.

P : Kalau ngeliput kan butuh data yang benar-bener akurat dan valid, sebagai wartawan sendiri gimana sih biar cari data biar benar-bener valid, karena kan itu bakal di *publish* di koran dan dibaca orang banyak, gimana?

W : Kita sistemnya dari informasi yang di dalam, ada dua informasi yang kita dalam, apa kepastian tentang kasus. Ya itu tentang perusahaan, ada perusahaan yang kabarnya jadi tersangka, kita kejar. Kalau kami biasanya ke Humas Polda kordinasinya, bagaimana konfirmasinya. Tanyakan nama perusahaan nya. Berjalan, kabarnya dua orang ditetapkan tersangkanya. Kalau polisi kebiasaannya kan sebelum berkas ini masuk ke pengadilan mereka tidak pernah membuka ungkap-ungkap. Siapa nama panjang orang itu (latar belakangnya *gak* dibuka), paling hanya inisialnya siapa, warga Negara apa, umurnya berapa.

Karena mereka ini warga negara asing setelah dia tertangkap tentu ada yang mengikuti, yaitu dia di cekal, *nah* untuk mendapatkan data tentang dia, kita konfirmasi ke imigrasi, dari imigrasi lah ketauan nama lengkapnya.

P : Ada kesulitan *gak* mas buat dapat narasumber?

W : Kalau sejauh data biasanya kalau belum puas dengan satu narasumber, kita cari narasumber yang lain sebagai perbandingan.

P : Narasumbernya sendiri susah atau tidak untuk diwawancarai?

W : Sejauh ini *gak* susah, karena sistemnya sebenarnya posko, kecuali mungkin kalau wartawan nasional yang disini, dia kan sendiri, dia yang memegang semuanya, berarti dia kesini, kemana-mana segala macam. Kalau kami, kayak PT ADEI PLANTATION yang ditetapkan sebagai tersangka ini kan daerah operasinya di Pelalawan otomatis kami yang di pekanbaru tidak memikirkan kondisi di Pelalawan bagaimna. Itu orang pelalawan lah yang tau.

P : **Kalau misalkan ni. kita butuh data tentang ini, tapi narasumbernya itu *gak* mau di wawancarai, susah ditemui, padahal kita benar-benar butuh, itu bagaimana ?**

W : Pertama, upaya konfirmasi kan harus ada, biasanya kita punya nomor kontaknya, kalau orangnya ditelepon, disms *gak* jawab, cari tau siapa yang memegang kasusnya, karena semua bekerja berdasarkan fungsi tugasnya masing-masing, kalau masalah kebakaran hutan kan Direktorat Criminal Khusus di Polda Riau, pergi kesana gitu. Kalau *gak* dapat juga kita harus menjadikan kawan anggota-anggotanya, secara global *sih*, informasi bisa dari mereka juga. Kita tanya sama anggotanya (ini gmna?), hal ini harus dikonfirmasi (kabarnya ini *kayak* gini ya), kalau kita sudah punya data, kita tanyanya enak, masalahnya kalau kita *gak* punya data, kalau kita tanya ya bakalan gitu, ada pertentangan kerja lah. Kalau wartawan mau buka seluas luasnya kan, kalau polisi membuka seperlunya saja.

P : **Berarti intinya ada *kroscek* lagi dengan narasumber lain?**

W : Ya intinya seperti itu, fungsinya dasar aja *sih* sebenarnya memang.

P : **Jadi untuk mengatasi kesulitan itu, tanya kontakannya, langsung hubungi,. kalau dari anda sendiri, solusi yang ditawarkan apa terkait kasus kebakaran hutan dan lahan ?**

W : Harusnya dievaluasi perusahaan-perusahaan yang ada disini, artinya kalau sudah misalnya kayak perusahaan dijadikan tersangka, otomatis kan ada keputusan bersama, artinya perusahaan yang dianggap salah ini bukan orangnya saja, kan ada dua proses ni :

Perusahaan ditetapkan jadi tersangka, artinya secara *general* ini perusahaan salah, setelah itu baru ditetapkan dua pimpinan jadi tersangka kan, artinya keberadaan perusahaan ini kan dievaluasi.

P : **Itu sebenarnya kebakaran hutan itu karena sengaja dibakar atau karena kebakar karena panas?**

W : Jadi kasus kebakaran di Riau kemaren ini, perusahaan nya cuma satu dan itu satu-satunya sampai sekarang jadi tersangka. Ada tersangka-tersangka perorangan, kalo di cari ada tu. Kalo data aku *gak* hafal, tapi ada. Rata-rata mereka membuka lahan, membuka lahan kalau dengan tata cara umum sekian ratus hektar kan biaya akan mahal. Maka pakai jalan cepat lah mereka, *bakar* aja pakai minyak, disiram.

P : **Kalo dari Riau Posnya sendiri ikut berperan *gak* terkait kasus ini, misalkan menawarkan solusi apa gitu?**

W : Sebenarnya fungsi media itu harus bisa menawarkan solusi, tapi kan tidak secara langsung medianya yang *ngomong*, kita cari siapa orang yang berkompeten untuk itu. Kan bisa minta buah pikiran dari ahli, misalnya pakar lingkungan, lalu kita suguhkan ke masyarakat, siapapun lah nanti masyarakat yang membaca itu. Karena kan diantara pihak-pihak yang berwenang terhadap masalah kebakaran hutan ni kan tidak langsung berkomunikasi, dinas kehutanan misalnya, kan tidak langsung berkomunikasi dengan kapolda. (ada mungkin yg mau disampaikan dinas kehutanan tentang solusi ini tp tidak bisa langsung ke kapolda, lalu melalui siapa? Ya sudah melalui media saja, gitu.).

P : Kalau Riau Pos sendiri menanggapi permasalahan lingkungan kebakaran hutan dan lahan ini gimana ?

W : Ini penting, malah sampai beberapa terbitan jadi halaman satu terus. Sampai akhirnya ada wartawan Riau Pos yang angkat tentang kebakaran hutan ini, juara tiga di lomba penulisan di KLH itu, redaktur dia. Itu penting karena untuk masyarakat dan isunya sudah nasional dan bencana nasional. Makanya harus ada yang disangkakan . kalau Cuma orang per orang tidak akan separah itu asapnya. Maka dicarilah siapa yang bertanggung jawab terhadap itu.

P : Itu yang dibakar daerah mana aja ?

W : *Searching* dulu. Itu isu besar, *gak* akan orang per orang yang menggarap , intinya kerja tim.

P : Kalau dari sisi penulisan beritanya sendiri, ini kan jurnalisme lingkungan, kan banyak pembaca yang masih kurang *ngerti* tentang ada bahasa-bahasa yang mungkin masih belum dimengerti orang, itu bagaimana cara mengatasinya agar pembaca *ngerti* ?

W : Wartawan itu harus mengerti dulu apa yang dia tulis, bentuk sederhana dalam masalah itu yang paling dimengerti masyarakat. Harus seperti itu dikemasnya.

P : Kalau di Riau Pos sendiri, ada *gak* wartawan yang khusus tentang lingkungan? *nah* kalau anda sendiri kan ini tentang kebakaran hutan otomatis kan ada istilah-istilah lingkungan yang mungkin agak kurang dimengerti, pernah dapat *kayak* misalkan pelatihan khusus *gak* tentang jurnalisme lingkungan ?

W : *Gak sih*, Cuma ya kita harus proaktif, cari tau apa yang tidak kita tau, kita cari tau sendiri (*googling*).

P : Kalau berita tentang kebakaran hutan nya sendiri tu sekarang sudah *gak* muncul, tapi yang penetapan tersangkanya itu yang masih muncul atau tidak ?

W : Iya, karena tidak ada masa kadaluarsanya, penyidikan itu kan berproses, penuntutan sampai di persidangan.

P : Sekarang juga msih berlanjut ?

W : Masih, karena diantara dua orang ini, baru satu yang berkasnya lengkap untuk penuntutan.

P : Kalau untuk menulis berita-berita lingkungan ada kesulitan *gak* ?

W : Sulit itu kan tergantung persepsi kita aja sebenarnya, anggap aja tantangan. Gambarannya, kita kan harus bertanggung jawab untuk memberikan informasi pada masyarakat, gimana caranya kita harus *ngerti*. Kalau kita *gak ngerti*, gimana kita bisa buat masyarakat *ngerti*.

P : Kalau kasus kebakaran hutan dan lahan, anda liputan atas inisiatif sendiri atau perintah dari pimred ? hubungan antara wartawan dengan pimrednya itu gimana ?

W : Ya *kayak* aku bilang tadi, kita ini kan penugasan berdasarkan prosedur. kebetulan kasus ini kan ada kaitan dengan masalah hukum, artinya kebakaran hutan ini kan masalah artinya ada pidana yang mengikutinya, pidana itu kan bisa dikenakan kepada siapa saja, yang menangani ya penegak hukum kan, polisi, jaksa. Itu aku liputannya langsung aja ke polda. Setiap hari kita kan *nyari* informasi ni. Aku rasa tidak harus diperintah lah. Cuma ada informasi kita kejar. Karena kan informasi itu bisa dari mana saja. Bisa kita dapat dari narasumber, bisa dari kabar angin yang belum dapat dipastikan dari bocoran-

bocoran. Kalau aku *gak* terlalu banyak *sih*, Cuma mantau masalah hukumnya saja.

P : **Saat ini masih liputan tentang kasus itu ?**

W : Iya mantau terus, Cuma terakhir minggu lalu baru ditahap dua kasusnya, berkasnya lengkap untuk penuntutan.

P : **Disini lagi liputan apa ? (POLRES)**

W : Lagi buat berita, kalau ke kantor jauh. Kalau tugas jurnalistiknya *tu* sama aja *sih* sebenarnya , objek peliputannya aja yang berbeda-beda

P : **Kalau anda sendiri ikut *gak* turun ke lapangan, memantau kebakaran hutan ?**

W : *Gak*, karena kita terikat posko, kalau kita pergi siapa yang jaga posko? Sementara ada kewajiban membuat berita lain juga. satu hari paling tidak 5-6 berita minimal dan harus berita yang berbeda.

P : **Ada *deadline* juga ?**

W : Iya, *deadline* sore, setiap hari. Karena Riau pos itu terbitnya ada 44 halaman.

P : **Itu kebakarannya kan udah sering, selama sering terjadi kebakaran itu selalu ngeliput tentang kebakaran *gak*?**

W : Aku jadi wartawan baru tiga tahun, baru satu kali kemaren yang besar-besaran, yang ikut liputan ini ya baru kali ini. kalau yang ke lokasi kebakaran cuma yang kecil-kecil, sekitar kota, polisi kan ada juga bantu turun,naik mobil *water canon* itu, kalau yang posko penanggungjawabnya langsung kan mereka pakai helikopter. Ya bekerja sesuai fungsi aja. Kalau aku mantau masalah hukum kriminalnya. kalau terus mantau kesana, kan sudah ada Eka, sudah ada *jobdesknya* masing-masing.

P : Sebelum kerja di Riau pos kerja dimana ?

W : Sebelum itu kuliah, aku sama Eka sama masuk Riau posnya. Kalau wartawan baru sih awalnya *gak* langsung di tempatkan di Polda, *kayak* aku awalnya di polsek-polsek. Wartawan harus punya jaringan yang luas, jadi dia tau. Kita wawancara pun tidak bisa langsung, kita harus tanya kan ulang, apakah orang tersebut yang menangani kasusnya. Kalau dilihatnya kita tidak cakap, dia menghindar-menghindar. Karena kita wawancara cari tau dulu sama teman-teman wartawan. lalu kita telepon aja, (pak mau tanya masalah ini), kalau itu kewenangan dia, pasti akan langsung dijawab, tapi kalau itu bukan kewenangan dia, pasti dia akan jawab, itu tidak kewenangan saya. Kalo instansi itu pasti ada Humas, yang awal tu pasti kita ke Humas, tanya tentang masalah ini, mau jumpa dengan orang yang terkait dengan hal ini.

P : Kalau misalkan itu kasus kewenangan dia, tapi dia *gak* mau *ngasih* informasi, bagaimana?

W : oo bagus sekali, ada yang ditutupi itu pasti masalah. Masalah ini kita mau tanyakan tentu kita sudah punya latar belakang. Kita coba kontak dia. Ditelepon *gak* jawab, disms *gak* balas, ya udah untuk konfirmasi kita buat itu. Masalahnya berita kita kan hak jawabnya nanti ada. Kita kejar dia bukan karena hak dia pribadi tapi karena itu kewenangan dia, atas dasar tugas dan jabatan dia, makanya dia pun harus menjawab. Rata-rata pejabat sekarang sudah banyak yang *ngerti*, walaupun dia belum siap (nanti dulu ya atau tunggu sebentar aku cari informassi lengkapnya).

Kalau *kayak* kami di Riau pos itu ada jurnalisme akomodatif, kita mengakomodir orang, artinya sesalah apapun orang, diaanya harus ditanya apa sebenarnya permasalahannya. Karena permasalahan itu kan tidak muncul dari ruang hampa, berita yang menjual itu kan berita masalah.

P : Kalau anda sendiri pernah *gak ngalamin* seperti itu, misalnya *nyari* orang tapi *gak* bisa ditemui terus ditulis seperti tadi, tapi narasumbernya itu protes dan menggunakan hak jawabnya?

W : Ada yang marah-marah aja, karena diberitakan, *gak* ada hak jawab, ya udah *gak* apa-apa.

P : Ada *gak* yang sampai nuntut karena pemberitaannya tidak benar ?

W : Sampai somasi belum pernah sejauh ini.

P :Kalau Riau Pos sendiri lebih pro kemana *sih* dalam hal pemberitaannya?

W : Kita akomodatif, mengakomodir.

P : Kalau mau liputan kan ada persiapan-persiapan tersendiri, dari mulai liputan sampai berita dikirim. Itu ada persiapan khusus *gak* saat akan meliput berita kebakaran hutan ini ?

W : Setiap pagi kebiasaan wartawan tu baca-baca, apa yang bagus, informasi sekecil apapun dalami-dalami. Persiapannya paling, mulai bekerja dengan pikiran yang jernih.

Transkrip Wawancara Mendalam dengan Jurnalis SKH Riau Pos (Eka Gusmadi Putra)

P : Kapan kebakaran hutan dan lahan itu terjadi ?

W : Awal Juni, ya awal Juni karena *dah* kemarau kan

P : Beritanya muncul mulai bulan Juni sampai kapan mas ? bisa diceritakan awal kasusnya?

W : Awal Juni, *dah* mulai kemarau awal-awal itu *kan*. Itu mulai banyak lahannya kebakar. Itu pakai puntung aja udah kebakar *kan* karena lahan-lahan di Riau ini lahannya *kan* gambut, jadi itu dimanfaatkan sama ini, sama orang yang buka lahan untuk perkebunan. Kebanyakan sawit, terus karet. Jadi ada yang perorangan ada yang perusahaan memang. Cuman mereka memanfaatkan orang gitu untuk membakar.

P : Itu memang sengaja dibakar gitu ?

W : Itu ada yang disengaja. Itu tadi yang buka lahan. Makanya sampai sekarang *kan* masih ada beberapa tersangka. Terus dari awal Juni, pertengahan Juni itu mulai terasa kabutnya. Aku karena baru buat kaledoskopnya jadi masih sedikit ingat. Waktu 21 Juni pokoknya ributlah . Tanggal-tanggal belasan, 17, 18 dah mulai anak-anak sekolah *diliburin*, terus data Dinas Kesehatan juga sudah banyak masyarakat yang terserang ISPA, itu sudah merata diseluruh kabupaten kota di Riau.

Tanggal 20 *kan* pemberitaan di Singapore mulai menentang SBY tu *kan*, *dah* mulai sampai Malaysia, Singapore, Filipina dan sebagian Thailand *kan*. Terus dari 21 disini rapat. Semua *tu*, Wakil Gubernur, Danrem, Danlanud, Kapolda. Jadi ditetapkan waktu itu tanggap darurat asap *kan* statusnya itu. Sorenya

habis rapat itu, tiga menteri kesini langsung *tu*, Gamawan, Agung Laksono sama Menteri pertanian Kuswono, sama kepala BNPB. Dari situ mulai dibuka posko disana, di Lanud TNI AU Roesmin Nurjadin namanya. Disitu ada posko, *nah* disitu ada penanganan bom air, terus teknologi modifikasi cuaca sampai 20 hari.

P : **Itu kebakarannya di daerah mana aja mas ?**

W : Hampir seluruh Kabupaten *tu*, Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan, Pekanbaru, Siak, lebih ke arah sini sih, ke pesisir. Cuman setelahnya menyebar juga Inhu (Indra Giri Hulu), Inhil (Indra Giri Hilir), Kampar, Kuansing.

P : **Masnya juga ikut terjun langsung ke lapangan ?**

W : Sempat ikut yang nyemai garam itu *kan*, yang ikut bikin hujan buatan, terus sempat turun ke Pelalawan juga, ya beberapa kali lah. Tapi yang jelas *stanbay* di posko penanggulangan bencana itu di TNI AU, karena beritanya harus rutin *kan*, harus di *follow up* terus, dari hasil penanganannya *gimana sih*, dari yang titik api awalnya tanggal 20 sampai 90an *kan*, semakin nurun, terus tanggal 5 udah mulai nol titik apinya, 5 Juli.

Tapi beres Juli ,masuk Agustus, pertengahan Agustus ada lagi, kebakar lagi. Itu lebih banyak di Pelalawan, Inhu sama Bengkalis, Siak. Itu sempat ada penanganan. Iya ini yang paling parah *kan* dari 2007. Sampai ke Malaysia juga *kan*. Ya kayak ada siklus *gitu*, siklus lima tahunan hehehehe. Ya mungkin *entah iya entah* tidak terlepas dari unsur politiknya, jadi bergening politik itu *kan* untuk buka lahan. *Emang* kebakaran juga, cuman *emang* yang paling parah. Jadi *kayak* Pelalawan yang dekat aja *kan* , mulai dari gerbang masuk itu sudah kebakar semua, Rohil juga. Kebetulan juga waktu itu kata BMKG asap itu mengarah ke Singapore, sampai ke Malaysia.

P : Bagaimana permasalahan yang dihadapi ketika menjalankan tugas jurnalistik, khususnya terkait kebakaran hutan di Riau?

W : Dari awal *emang* sudah kendala *sih*, kenapa? Karena poskonya di AU. *Kan* tau wartawan sama TNI AU *kan* pernah dulu waktu Sukhoi jatuh, pesawat tempur itu jatuh. Sejak itu hubungan sudah tidak baik. Masuk saja kami harus diperiksa dengan tepat, KTP ditinggal, *ngisi* absen. Itu kendala awal. Tapi karena dari BNPBnya ini menjadi isu nasional, BNPB yang *back-up* untuk berangkat mau nyemai. Cuman waktu itu *ngebom ndak* bisa, karena terbatas *kan*, karena helikopternya sendiri bawa beban air 2000an liter , kalau kendala peliputan herkulesnya sendiri *kan*, herkules ketinggiannya *kayak gitu*. Kita *gak* pernah *kan*, karena diatas *kan* nyari awan yang benar-benar awan bisa dijadiin hujan. Jadi naik *ni* 1500 misalnya *kan*, *gak* ketemu awannya , naik lagi sampai ketempat yang kekurangan udara gitu. Itu kalau di udaranya.

Kalau di lapangannya pasti medannya, karena cenderung pemadaman itu tidak yang dipinggir jalan *kan* itu, harus masuk kedalam, karena hawanya sendiri udah panas.

P : Masnya sendiri pernah masuk *gak* ?

W : Iya, kami pernah investigasi sama fotografer

P : Itu *kan* sulit banget, bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan yang datang pada saat melaksanakan tugas sebagai seorang jurnalis lingkungan ?

W : Sebenarnya kebakaran hutan dan lahan tugas sebagai peliput juga gitu, yang juga ditugasi kantor, ya *kayak* ke lapangannya gitu ya bisa diatasi aja *sih*. Paling memang tidak sebentar, butuh waktu. Misalnya *gak* bisa selesai hari ini, konfirmasi lagi ke kantor belum dapat bahannya terus *nginap* dulu gitu. Minta waktu aja *sih*.

P : Karena ada *deadline-deadline* gitu ya ?

W : Iya, paling bahan seadanya sampai disitu aja, paling konfirmasi terbatas aja sama kepala BPPD sini *by phone* gitu.

P : Ini *kan* termasuk jurnalisme lingkungan *kan* ya. Kalau dari dari jurnalisme lingkungannya sendiri ada *problemnya* *gak*? *Kan* *gak* secara umum, misalnya kayak politik sendiri, *kan* beda-beda kesulitannya. Kalau di lingkungan sendiri ada kesulitan tersendiri *gak* saat *ngeliput*?

W : Dari lingkungan, kesulitannya kita *ngadepin* asap, rentan dengan Ispa. Pada waktu itu indeks Ispu itu sudah jauh di atas dari yang awalnya 230 standarnya, ini sudah sampai 350-400. Dan bukan untuk pribadi juga, tapi untuk Riau keseluruhan, untuk flora dan faunanya juga. Masyarakatnya juga memang sudah tercemar. Kementerian Lingkungan Hidup juga langsung turun waktu itu *kan* .

P : Kalau dari sisi penulisannya sendiri, itu *kan* ada istilah-istilah khusus juga *kan* kalau di lingkungan, seperti Ispa, Ispu. Itu *gimana* ?*kan* ada tu pembaca yang kurang *ngerti* tentang istilah-istilah gitu, *nah*, masnya sendiri *gimana* nulisnya biar pembaca itu *ngerti* maksudnya ?

W : Ya kalau misalnya bahasa awam *gak* apa-apa *kan* dituliskan langsung. Cuma kalau ada istilah dari lingkungan hidup atau dari tulisan mengenai itu, paling dikasih penjelasan aja setelahnya. Misalnya Ispu itu tadi, ya dijelasin aja beberapa kata gitu, Ispu itu apa *sih* gitu, kenapa lahan gambut itu mudah terbakar, dan segala macam. Paling kalau aku *gak* tau istilah itu artinya apa dan narasumber tidak bisa jelasin pada saat itu juga, paling ya *searching*, karena memang banyak bahasa baru.

P : Untuk jurnalisme lingkungan sendiri ada pelatihan khususnya *gak* mas, *kan* itu tadi ada bahasa-bahasa awamnya?

W : Untuk pelatihan khusus seperti itu tidak ada. Cuma kalau seminar atau worksop gitu mengenai lingkungan yang diadakan oleh BKSDA sering ikut.

P : **Jadi sedikit *ngerti* lah ya tentang istilah-istilah gitu ?**

W : Sedikit memahami. Ya itu tadi kalau benar-benar belum *ngerti* dan belum paham ya *googling*.

P : **Bagaimana solusi yang ditawarkan terkait kasus-kasus lingkungan yang terjadi, khususnya kebakaran hutan dan lahan yang belum lama ini terjadi di Riau?**

W : Emang harus ada regulasi yang jelas sebenarnya untuk masyarakat atau perusahaan yang membuka lahan gimana *sih* gitu. Misalnya mereka punya areal 1000 hektar gitu, yang untuk penanamannya 500 hektar. Cara untuk membuka lahan itu harus jelas gitu. Harus ada regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Perkebunan, semuanya harus bersinergi gitu. Jadi dengan gitu kan, kata Siswono juga kan waktu itu ada cara lain untuk membuka lahan selain membakar, tidak dengan membakar gitu. Bisa dengan menggunakan alat berat dan segala macam. Cuma kan kendalanya bagi perusahaan atau masyarakat yang pengen berkebun itu, biayanya jauh lebih mahal. Kalau pakai api kan tinggal siram aja pakai bensin habis. Tapi kalau ada regulasi kan bisa jelas, Polda juga bisa nindak tegas. Karena rata-rata dari belasan tersangka dalam kebakaran kemarin itu perusahaan Malaysia, makanya kalau Riau sendiri menangani ini gak mungkin bisa. Ini butuh sinergi dari semua kementerian.

P : **Sekarang masih berlanjut *gak* kasusnya itu ?**

W : Masih, sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka

P : **Kalau kebakarannya sendiri masih ada atau tidak ?**

W : Untuk kebakarannya sendiri sudah tidak ada, kan musim hujan. Tapi untuk Riau sendiri sudah ada kemajuan sih. Karena kemarin sudah disahkan juga perda tentang bencana alam. Dari perda itu nanti Riau sendiri sebelum musim kemarau, sebelum kebakaran itu sendiri terjadi bisa dilakukan penanganan. Lewat sosialisasi atau penjelasan kepada perusahaan untuk tidak membuka lahan dengan membakar. Baru disahkan kemarin 25 November.

P : **Itu beritanya terakhir bulan apa mas ?**

W : Ya yang 10 Juli posko ditutup , terus udah mulai pelacakan tersangka, titik api sudah *gak* ada. Di pertengahan Agustus kebakaran lagi, tapi bukan yang di lokasi pertama. Pindah lokasi kebakarannya.

P : **Pertengahan Agustus sampai kapan ?**

W : Sampai 31 Agustus, karena kan BNPB masih pakai helicopter. *Dah* masuk September udah *gak* ada lagi, curah hujan udah mulai turun lagi

P : **Bagaimana peran serta Riau Pos dan Jurnalis Lingkungan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau ?**

W : Ya perannya paling sebagai media kontrol sosial , memberitakan saja dan memang kami selalu menempatkan itu di halaman satu, di *headline*. Terus kan Riau Pos dibaca oleh masyarakat, pejabat, segala macam. Dari situ aja sih berharap *follow up*nya terus. Kan karena grup Jawa Pos, jadi yang besar-besarnya tetap dinaikkan di JPNN, selain di *online* dan di Koran. Kan isunya menyangkut SBY, pasca dia minta maaf sama Singapore.

P : **Riau Pos sendiri *concern* gak sama masalah-masalah lingkungan ?**

W : Ya *concern*. Tiap minggu kan kita siapkan halaman *save the earth*. Tiap minggu kan ada itu.

P : Setiap minggu pasti ada ?

W : Ada, pasti ada. Semua tentang lingkungan. Ada tim minggunya.

P : Anda sendiri ikut nulis di halaman *save the earth* gak ?

W : *Nggak*. Senin sampai Kamis *tu* dia keliling, Jumat, Sabtu baru *deadline*.

P : Bagaimana cara Riau Pos menanggapi dan memahami permasalahan lingkungan khususnya kebakaran hutan dan lahan yang sudah sering terjadi di Riau ?

W : Lewat pemberitaan aja *sih* sebenarnya. Tapi tim minggu juga setiap mereka bergerak ke lapangan itu selalu mengajaklah. Mengajak perusahaan agar tetap peduli. Karena kan kalau tidak ada peran media juga akan jauh lebih parah *sih*.

Karena gampang benar disini dirusak. Kalau ada kemarau ya udah, tinggal lempar puntung rokok aja bisa kebakar ribuan hektar kalau *dibiarin*. Satu lagi keterbatasan Riau juga kemarin, *gak* ada peralatan yang cukup, jadi harus minta bantuan.

P : Kalau di Riau Pos ada *gak* jurnalis yang khusus lingkungan ?

W : Paling ya tim minggu, karena yang harian tiap tahun pindah-pindah. Harus *nguasain* semua. Gak ada wartawan khusus. Paling yang ada ya wartawan budaya. Kalau lingkungan ya lihat situasinya aja. Kalau memang *scopenya* propinsi ya aku.

P : Bagaimana cara yang dilakukan agar mendapatkan data yang akurat dari narasumber terkait kasus kebakaran hutan dan lahan ?

W : Ya gerak ke ini aja, ke BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), terus ke BLH (Badan Lingkungan Hidup), yang punya data itu *sih* dua itu,

sama dinas perkebunan dan kehutanan. Kalau misalnya pengen data tentang ISPU minta ke lingkungan hidup. Pengen minta tentang data yang terserang ISPA misalnya minta ke kesehatan, gerak-gerak gitu aja.

P : Itu mereka *ngasih* atau ada kesulitan-kesulitannya untuk *dapetin* data itu ?

W : Ada, kadang banyak alasan untuk yang berkompeten memberi informasi itu tidak ada, nanti telepon kepala dinasnya aja.

P : Wawancara via telepon gitu ?

W : Telephone, minta arahan kepada kepala dinasnya, minta data kemana *ni*, biar dia yang delegasikan. Kalau udah kepalanya yang bilang kan, udah ikut aja orang. Karena kalau minta Gubernurnya kan, waktu itu gubernurnya di KPK, jadi wakilnya. paling kalo *mentok* gak dapat, sementara *deadline*, minta ke wakil gubernur.

P : Itu pasti dikasih atau tidak ?

W : Dari gubernur dimintakan ke anggota-anggotanya.

P : Wakil gubernur itu pasti mau untuk diwawancarai ?

W : Kalau untuk yang kasus Karhutla kemarin ya mau. Kalau isu publik biasanya mereka mau *ngasih*.

P : Jadi *gak* terlalu banyak kendala ya ?

W : *Nggak*, BMKG juga untuk titik api mereka mau *ngasih*

P : Anda sendiri *kan* ikut *ngeliput* kebakaran hutan dan lahan, itu perintah dari pimred atau inisiatif sendiri untu *meliput* ?

W : Untuk turun di lapangan seringnya inisiatif. Karena kan pasokan berita harus tetap terjaga. Inisiatif aja. Misalnya bang aku ikut nyemai ya, beritanya gimana? Aman

P : **Jadi *gak* harus diperintah untuk liputan ?**

W : *Nggak*, yang jelas jaga posko aja, kalau isunya propinsi ya itu kewenangan ku. Selesai liputan langsung kirim berita *by email*, *gak* mesti ke kantor. Kalau lagi liputan gini ada rapat kan *gak* mungkin ke kantor. Apalagi kalau yag di Pelalawan kan *gak* mungkin ikut rapat.

P : **Rapatnya mingguan atau gimana ?**

W : Rapatnya sebenarnya tiap hari. Cuman ya itu tadi kalau kita *gak* bisa ke kantor ya tinggal bilang aja karena liputan *gak* bisa ke kantor, berita kirim aja.

P : **Kalau kebakaran yang sebelumnya ikut *ngeliput* juga ?**

W : Kalau kebakran yang 2012 aku *gak ngurusi*. Ya itu tadi, kita dipindah-pindahin tiap tahun biar menguasai semua, *gak* ada yang khusus, yang tim minggu juga. *Kayak* aku gitu, udah *ngerasain* semua posko, nanti ditarik tim minggu. Itu kan ada liputan khusus juga, ada liputan *for us* juga.

Ya kendalanya itu aja, ya sebagai jurnalis juga sebenarnya *gak* ada yang bisa jadi kendala. Kalau *gak* bisa narasumber yang ini, cari narasumber lain. Kalau *deadline* memang datanya Cuma segini ya kita bilang nanti bisa di *follow up* lagi.

P : **Sebelum liputan ada persiapan-persiapan khusus *gak sih*? Misalnya mau kemana, mau wawancara siapa, cari data kemana. Dari persiapan liputan sampai pengiriman beritanya ada kendala *gak* ?**

W : Kita lihat isu hari sebelumnya sama hasil rapat sore, jadi bisa tau. Kalau misalnya *gak* ada *moment* besar. *Follow up* yang hari ini. misalnya hari ini di halaman satu atau halaman pro otonomi itu masalah pembatasan lima desa, misalnya *gak* ada penjelasan, *follow up* aja ke propinsi.

P : **Kalau kebakaran hutan kemarin dari Juni, Juli, Agustus, itu liputannya setiap hari atau gimana ?**

W : Ya setiap hari. Ya *progress* penanganannya lah ya, terus misalnya hari ini berapa yang di bom, hasilnya, terus besok rencananya kemana, gimana hasil seminggu. Terus dilihat dari aspek lain, lingkungannya gimana, sudah berapa yang terbakar, *follow upnya* gimana. Gitu aja *sih* kalau peran Riau Posnya sendiri.

P : **Jadi hampir setiap hari berita kebakaran muncul di *headline* ya ?**

W : Iya, dari tanggal 20 Juni samapai tanggal 5 Juli lah, sekaligus fotonya.

P : **Fotografernya ikut juga atau anda sendiri ?**

W : Ya fotografernya ada.

P : **Kalau Riau Pos kan media lokal. Biasanya ada kedekatan tersendiri pada masyarakat Pekanbaru, Riau. Gimana *sih* biar masyarakat itu percaya dengan pemberitaan Riau Pos? dari sisi penulisan beritanya sendiri gimana, kan masyarakat butuh banyak informasi perkembangan kasus kebakaran hutan dan lahan?**

W : Ya ini aja *sih*, menyajikan berita yang *real*. Kan pernah turun di lapangan, jadi tau menyajikan berita menurut masyarakatnya aja gimana. Bagaimana *ngerasain* kebakaran hutan. kan sampai ada korban kan, sampai ada yang meninggal. Ya turun ke lapangan terus. Ya menyajikan tulisan yang

menunjukkan empati lah ya dalam penulisannya. Mencoba di posisi masyarakat. Terus diambil *statement* dari pemerintah untuk penanganannya.

P : ***Gak* berpihak ke salah satunya ?**

W : *Gak*. Ya itu juga gunanya turun ke lapangan, tau kondisi *realnya*. Karena *omongan* pejabat, *omongan* tim di posko itu kan yang oke-oke aja kan, gimana *realnya* di lapangan mereka *gak* mau menyebutkan. Selain itu juga karena Riau Pos punya wartawan diseluruh kabupaten, jadi penyajiannya bisa berimbang. 12 Kabupaten kota ada.

P : **Kalau disini sendiri ada berapa wartawannya ?**

W : Pekanbaru yang di lapangan ada belasan. *Gak* sampai 15 sih. Pemberitaan satu wilayah bukan aku sendiri, tapi keroyokan. Tapi yang konsen di posko aku. *Kayak* yang di Polda ya harus *follow up* yang disana.

Memberanlar Kemiskinan, Kebodohan & Keteringgalan Infrastruktur

Tim Pengembangan Kurikulum Tak Jalan

Laporan EKA GUSMADI PUTRA, Pekanbaru ekagusmadi@riauup.com

MESKIPUN pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah menetapkan perubahan kurikulum dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) kepada Kurikulum 2013, namun penerapannya memang belum sepenuhnya di seluruh sekolah negeri terlebih swasta. Bahkan, untuk KTSP sendiri sejak digulirkan pada 2007 silam, di

Memang ada kabupaten yang belum membentuk tim pengembangan kurikulum, apalagi sekolah. Jadi memang belum sepenuhnya bisa maksimal.

HADIMHARJA Pili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau



Provinsi Riau sendiri Tim Pengembangan Kurikulum sebagai pengelola program kurikulum ini masih ada yang belum terbentuk. Tak tanggung-tanggung di lima kabupaten/

kota di Riau disinyalir belum memiliki tim ini. "Memang ada kabupaten yang belum membentuk tim pengembangan kurikulum, apalagi sekolah. Jadi

memang belum sepenuhnya bisa maksimal," kata Pili Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau Hadimharja menjawab Riau Pos. Senin (26/8) usai membuka workshop implementasi KTSP bagi guru SMP se-Riau 2013 angkatan I dan II untuk mata pelajaran biologi, fisika, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan PKN di salah satu hotel di Pekanbaru.

Dijelaskan Hadi, kuatnya tim pengembangan kabupaten terganggu provinsi. Walaupun ada beberapa sekolah bisa membentuk sendiri

tanpa harus menunggu tim kabupaten/kota. Karena bertugas dalam menganalisis program-program kegiatan di tim dalam mengembangkan kurikulum, ada kegiatan dan apa yang menjadi keperluan haruslah bermanfaat output-nya bagi pendidikan.

Saat ini Disdik Provinsi Riau sedang melakukan penguatan tim pengembangan kurikulum di tingkat provinsi. "Karena kabupaten harus mengikuti kuatnya provinsi. Kalau Provinsi masih lemah memang akan susah diikuti daerah," tuturnya.

Karenanya tim pengembangan kurikulum ini harus terbentuk di sekolah karena kalau belum terbentuk, siapa yang akan mengelola KTSP. Sebab, lanjutnya memetakan satuan kerja sesuai karakteristik sekolah itu yang harus dilakukan, seperti menyusun silabus sampai pada memberikan penilaian.

"Melalui kompetensi inilah diharapkan dari workshop ini bisa tercapai apa yang diinginkan tersebut," kata ketua tim pengembangan kurikulum Provinsi Riau ini menutup perbincangan (yls)

ADVERTORIAL PEMPROV RIAU

Sekda Pastikan Belum Ada Rencana Mutasi

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Riau belum berencana melakukan mutasi-dan promosi pejabat dalam waktu dekat ini. Informasi ini menjadi jawaban akan isu mutasi yang mulai berkembang di lingkungan Pemprov Riau.

"Belum, belum ada rencana mutasi. Roda pemerintahan masih berjalan normal dan lancar. Jadi, tidak ada rencana mutasi," tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Zaini Ismail menjawab Riau

Pos, Senin (26/8) di Kantor Gubernur Riau. Menurutny, proses mutasi belum begitu mendesak untuk dilakukan. Dia menilai, salah satu pertimbangan belum akan dilakukannya mutasi adalah pelaksanaan Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau yang semakin dekat. Pengesahan pejabat di kawasan tersebut dapat menimbulkan informasi yang tidak tepat di kalangan masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Pertimbangan lain adalah

masa kepemimpinan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau akan berakhir dalam waktu dekat ini. Dengan pertimbangan itu, Zaini menilai, proses mutasi dan promosi jabatan belum dilaksanakan. Saat ditanyakan mengenai kesediaan jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dia mengatakan hal tersebut sudah ada pelimpahan wewenang. Sehingga, tidak ada jabatan yang kosong dan proses

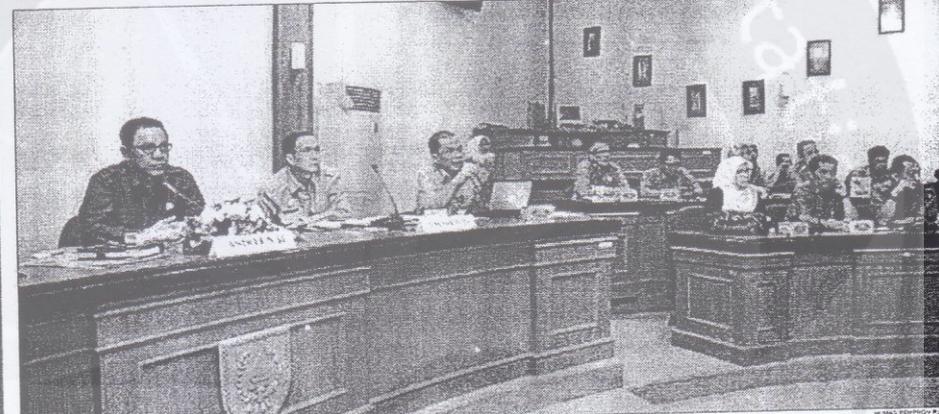


ZAINI ISMAIL

ses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tetap berjalan sesuai mekanisme pemerintahan. Disinggung mengenai adanya

pembahasan di Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Bapejabat) untuk proses mutasi, Zaini menyanggah dengan senyap. Dia menilai, proses pembahasan tersebut tentu sudah dilakukan. Namun, untuk implementasinya dinilai belum tepat.

"Yang pasti dalam waktu dekat ini belum ada mutasi. Kita sedang menyambut pesta demokrasi. Untuk pengesaran jabatan, tunggu saja tanggal mainnya," katanya (adv/b)



EVALUASI APBD: Asisten II Seldaprov Riau Emrizal Pakis didampingi Asisten III Hardy Jamaluddin memimpin rapat realisasi APBD 2013 yang dihadiri seluruh satuan kerja di lingkungan Pemprov Riau, pekan lalu.

KUA-PPAS Tunggu Pembahasan Banggar

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Riau sudah menyerahkan Kebijakan Unam APBD dan Prioritas Unam APBD dan Prioritas Unam APBD Arangan Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2013 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau. Kini

prosesnya sedang menunggu pembahasan. Demikian dikemukakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Zaini Ismail, Senin (26/8) di Kantor Gubernur. Menurutny, draf KUA-PPAS untuk APBD-P 2013

sudah tuntas dan sudah diserahkan ke pihak Dewan Kematangan. Dengan demikian diharapkan pembahasan dapat segera rampung dalam waktu dekat. "Mudah-mudahan di penghubung bulan ini pembahasan sudah dapat dituntaskan,

karena sudah diserahkan," ungkapnya. Disinggung mengenai berapa total anggaran yang diusulkan pada APBD-Perubahan, Zaini mengaku belum bisa memastikan berapa angkanya. Demikian pula tentang total

keseluruhan program yang akan dipaparkan dalam perubahan anggaran dalam usulan tersebut. "Kita berharap semuanya dapat diges secepat proses pembahasan segera tuntas," harapnya (adv/a)

PEKANBARU

Jaksa Bersikukuh Kasus Zulfakri Penyuaan

PEKANBARU (RP) — Kasus yang menimpa mantan Kepala Satuan Reserse (Kasat Res) Narkoba Polres Rohul AKP Zulfakri dinilai sudah tepat ditangani Pengadilan Tipikor. Karena, apa yang dilakukan Zulfakri kuat dugaan merupakan suap dan Zulfakri merupakan aparat pemerintah.

Hal ini disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejri-1) Pasirpangaran Iskandar Zulkarnain SH dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap Rp200 juta tersebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (26/8). "Posisi terdakwa sebagai pegawai negeri yang mempunyai jabatan saat kasus tersebut terjadi," ujar JPU.

Dikatakannya, dengan jabatan tersebut Zulfakri diduga menerima uang Rp200 juta dari seorang tersangka narkoba, Andesa. "Itu adalah janji atau hadiah untuk bisa membebaskan Andesa dari kasus tersebut," lanjutnya.

Karena itulah, Iskandar mengatakan perkara Zulfakri ini bukan termasuk pemerasan. "Karenanya meminta majelis hakim untuk menyatakan Pengadilan Tipikor berwenang mengadili perkara ini dan menyatakan perkara ini dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi," ucapnya.

Pada sidang sebelumnya, terdakwa suap Rp200 juta yang juga mantan Kepala Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Rokan Hulu (Rohul) AKP Zulfakri menilai bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor untuk menyidangkan kasusnya. Penasehat hukumnya, Asep Rukhyat SH menilai uang yang diterima itu bukan suap, melainkan kasus pidana umum pasal 368 KUHP (pemerasan).

Dalam kasus ini, Zulfakri dijerat pasal 12 huruf b, pasal 5 ayat 2 juncto pasal 5 ayat 1 huruf a dan pasal 11 Undang-Undang nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman kurungan maksimal 20 tahun penjara (ali)

Sanggar Bujang Dara Pemenang Festival Teater Remaja

PEKANBARU (RP) — Sanggar Bujang Dara SMAN 1 Tembilahan tampil sebagai penjuwa terbaik saat dalam helai Festival Teater Remaja 2013 tajaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Riau UPT Taman Budaya yang berlangsung 23-24 Agustus di Anjung Seni Idrus Tintin.

Adapun posisi penjuwa terbaik kedua diperoleh Teater Hujan SMK Labor Pekanbaru. Sedangkan Teater Sanjaya Kampar sebagai penjuwa terbaik ketiga.

Dalam helai tersebut juga diumumkan kategori sutradara terbaik yang dipercayakan Badru Chaerudin (Sanggar Bujang Dara SMAN 1 Tembilahan), sutradara terbaik 2 Intan Yunita Teater Sanjaya Kampar), dan Sri Subekti Wiyana (Teater Hujan SMK Labor) sebagai sutradara terbaik 3.

Sementara itu aktor terbaik 1 jatuh kepada Agus Ariya Santa dalam peran Pak Tua (Sanggar Bujang Dara), aktor terbaik 2 Muriata Hanum memerankan Nursiah (Teater Hujan), dan aktor terbaik 3 Claudia Aprilia berperan sebagai Dang Sri Intan (SMA 9 Pekanbaru). Untuk kategori naskah terbaik jatuh kepada sanggar dari Dumai, meskipun terbaik dari SMAN 9 Pekanbaru dan penata artistik terbaik jatuh kepada Sanggar Bujang Dara.

Mevakili Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Yoserial Zein selaku Kepala Museum, mengajak para generasi muda yang tinggal Riau, terutama yang ikut bertelut untuk meningkatkan dan mengutamakan semangat ke-Riau-an. Dijelaskan Yoserial, sejalan dengan ajakannya itu dan terkait dengan kreativitas yang mesti diperkenalkan ke depan hendaknya sesuai dengan semangat visi Riau di mana berhalajat menjadi pusat kebudayaan Melayu di Bentangan Asia Tenggara pada 2020. "Seluruh elemen yang tinggal di Riau harus merada memiliki Riau dan ikut membangun Riau. Semangat ke-Riau-an harus diibangkitkan," ujar Yoserial Zein saat menutup acara Festival Teater Remaja se-Riau di Anjung Seni Idrus Tintin (24/8). (16/dac)

12 September, Kloter Sambungan dari hal. 21

"Untuk Riau JCH nya berangkat dari kloter empat sampai 14. Pembagian kloter sudah ditentukan oleh panitia hajidari embarkasi Batam. Untuk kloter 14 kita bergabung dengan JCH dari Kalimantan Barat," ungkap Derbangung. Saat ditanyai mengenai persiapan penyelenggaraan hajidari, dia mengatakan prosessnya terus berlangsung. Dalam hal ini, penyelenggaraan disesuaikan dengan pembagian tugas, baik di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.

Untuk administrasi keberangkatan, paspor dan visa menjadi tanggung jawab Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau. Sementara untuk suntik meningitis, biaya domestik dan persiapan lainnya menjadi kewenangan Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota se-Riau dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait.

Disinggung mengenai persiapan paspor hajidari, dia mengatakan untuk paspor haji sudah rampung. Saat ini, sedang digesa untuk persiapan pengurusan visa keberangkatan JCH.

"Yang sudah kita terima ada 2.000 visa JCH. Sisanya sedang dijemput, kabarnya sudah selesai 2000 visa baru. Artinya sudah hampir 4.000 visa JCH yang rampung. Sisanya sedang diproses," urai Derbangung (rio)

Sambungan dari hal. 21

temperatur masih normal, berkisar 33 derajat celsius. "Temperatur masih normal dan belum ekstrem," katanya.

Sampai hari ini disampaikan Danlanud Roesmin Nurjalid, Kol Pnb Andvawan sebagai satgas udara untuk karhutla, melalui Kapentak Mayor Sus Filipsoidi SSoS mengatakan AU masih melakukan water bombing di titik-titik kebakaran. "Masih, kita masih melakukan water bombing di titik-titik kebakaran, sehari bisa naik satu helikopter atau bahkan dua," jelas Filipsoidi.

Sementara itu, akibat masih

terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdampak pada kondisi udara di Pekanbaru, pagi hari jarak pandang menjadi terbatas. Untuk Senin (26/8) jarak pandang di Pekanbaru minimum 1.000 meter, langit tertutup kabut asap.

"Perubahan normal hanya saja tadi pukul 7.00 WIB terjadi kabut asap dengan jarak pandang 1.000 meter, hanya berkurang sekitar 1,5 jam jarak pandang sudah di atas 3.000 meter karena asap sudah berlalu. Untuk airport daya mudah Bandara SKK II Ibu Hasan.

Selain itu disampikannya juga bahwa untuk jumlah tidak

berpengaruh dengan kondisi cuaca saat ini. "Sesudah lebaran tepatnya H+9 dan 10 penumpung mencapai 11.500 orang orang dibandingkan sebelum hari raya Idul Fitri hanya 10.000 orang orang saja," kata Ibnu mengkhiri.

BPBD Inhu Daerah Antisipasi Karhutla

Terkait dengan hotspot yang kembali menyelimuti Riau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau mengimbau kabupaten/kota untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ini menjadi perhatian, karena intensitas asap di

Riau kembali meningkat.

"Ya memang saat ini intensitas kabut asap mulai meningkat. Untuk itu, kami minta seluruh kabupaten/kota untuk dapat siaga. Begitu juga pihak-pihak terkait yang berkompeten di bidangnya," ujar Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kaifi Azmi saat dihubungi melalui telepon seluler.

Mengenal langkah antisipasi yang dapat dilakukan, dia mengatakan salah satu langkah konkret adalah mengoptimalkan pengawasan. Jika perlu BPBD di kabupaten/kota turun ke titik-titik yang tergolong rawan karhutla.

"Kita tentunya siap berkoordinasi dan merencanakan bersama.

Hanya saja, yang telah dahulu mengetahui itu adalah kabupaten/kota. Karena mereka yang memiliki wilayah," terangnya.

Langkah antisipasi awal yang juga dapat dilakukan dengan berkoordinasi bersama perusahaan dan mengoptimalkan masyarakat peduli api (MPA).

Saat ditanyakan mengenai jumlah hot spot yang terpantau, dia mengaku belum mengetahui angka pasti. Pasalnya, BPBD Riau belum mendapatkan laporan dari EMKG.

"Biasanya laporan disampaikan melalui hari atau keesokan harinya. Kita tentu akan mengupdate informasi tersebut. Nanti akan kita krus cek langsung," ungkapnya (yls)

Riau Belum Bebas Hot Spot

Dikenai Pajak

Sambungan dari hal. 21

Pusat. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI menjadi tempat Pemerintah Provinsi Riau berkoordinasi.

"Intrinya sampai hari ini menunggu rekomendasi Kemendagri dan Kementerian Keuangan RI. Pasalnya, dari konsultasi kita, bangunan yang merupakan kerjasama dengan pemerintah tidak dikenakan pajak," kata Kepala Biro Perencanaan Seldaprov Riau, Abdi Haro kepada Riau Pos, Senin (26/8) di Kantor Gubernur Riau. Dia menilai, langkah yang ditempuh bukanlah karena tidak ingin memencilkan tanggung jawab retribusi IMB. Namun, acuan

Pemprov Mengadu ke Kemendagri

yang digunakan yakni Permendagri nomor 17/2007 tentang petunjuk teknis pengelolaan barang daerah mengutarai hal demikian.

"Meskipun sistem yang digunakan bangun guna serah (BGS). Namun, dalam jangka waktu tertentu akan dikembalikan ke pemerintah. Artinya, ada keterlibatan pemerintah di sana. Makanya, peraturan yang digunakan idealnya Permendagri," ujar Abdi.

Pengaduan Tower Inhu

Sambungan dari hal. 21

hakim yang dipimpin Masrizal SH, proyek ini awalnya dianggarkan pada 2011. Penganggaran pertama Rp767 juta, tidak hanya pembangunan tower. Namun juga pembangunan tower, namun juga pembangunan tower dan printer. "Anggaran kedua mencan biaya Rp706 juta yang dimasukkan pada APBD-P Inhu pada tahun yang sama," ujar saksi.

Dikatakan saksi lagi, ia hanya membangun tower. Setelah proyek selesai dan serah terima pekerjaan ditandatangani, belakngan baru diketahui bahwa yang ditandatangani saksi kemara

Pengaduan Tower Inhu

Sambungan dari hal. 21

hakim yang dipimpin Masrizal SH, proyek ini awalnya dianggarkan pada 2011. Penganggaran pertama Rp767 juta, tidak hanya pembangunan tower. Namun juga pembangunan tower, namun juga pembangunan tower dan printer. "Anggaran kedua mencan biaya Rp706 juta yang dimasukkan pada APBD-P Inhu pada tahun yang sama," ujar saksi.

Dikatakan saksi lagi, ia hanya membangun tower. Setelah proyek selesai dan serah terima pekerjaan ditandatangani, belakngan baru diketahui bahwa yang ditandatangani saksi kemara



Data Diri dan Jenjang Karir

Lahir: Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957
Ukai: 56 tahun

- 2013: Panglima TNI 2013, KSAD
- 2013: Wakil Gubernur Lemhannas
- 2010: Pangdam IISilwangi
- 2010: Pangdam XIV Tanjungpura 2010

MOELDOKO

Moeldoko Panglima TNI

JAKARTA (RP) - Penunjukan Jenderal TNI Moeldoko sebagai panglima TNI berjalan begitu mulus. Setelah lolos uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I, kemarin rapat paripurna DPR menyetujui pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut untuk menggantikan Laksamana Agus Suhartono.

Pria yang lahir di Kediri, 8 Juli 1957, itu juga tidak perlu menunggu lama untuk dilantik. "Pelantikan panglima TNI pada 30 Agustus ini," ujar Juru Bicara Presiden Julian Adrin Pasha, Selasa (27/8).

Wajah Moeldoko kemarin begitu semringah. Setelah rapat paripurna, dia memberi hormat secara khusus kepada para wakil rakyat. Menurut Moeldoko, setelah dilantik, agenda pertama yang akan dijalankan adalah melakukan konsolidasi internal.

Baca Moeldoko Halaman 11

SUDUT PANDANG



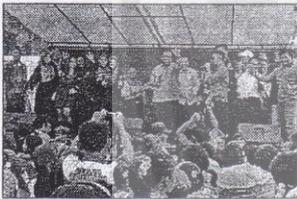
INGAT: ATASAN YANG BAIK ADALAH ATASAN YANG PERNAH MENJADI BAWAHAN YANG BAIK.

Dikutip dari Buku Manufacturing Hope: Esai

DAHIAN ISKAN

HAJAT SALAT	SUBUH	ZUHUR	ASAR	MAGHRIB	ISYAK
Unit Pekanbaru dan Sekitarnya	04.38	12.17	19.32	18.23	19.28

Rengas 6 mnt, Sarungbagung 2 mnt, Tambakan 7 mnt, Pasirpanjan 10 mnt, Sarungbagung 3 mnt, Sarungbagung 5 mnt, Pangkajene 10 mnt, Sialang 10 mnt, Sarungbagung 10 mnt, Sarungbagung 12 mnt, Sarungbagung 12 mnt, Sarungbagung 12 mnt, Sarungbagung 12 mnt.



ORASI: Gagrib HM Lukman Edy memberikan orasi di depan massa pendukungnya saat kampanye di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Selasa (27/8/2013).

Majukan Riau, LE Tawarkan Empat Pilar

UJUNG TANJUNG (RP) - Hiburan dari panggung rakyat masih mengalunkan lagu dangdut, saat calon Gubernur Riau HM Lukman Edy menjejakan kakinya pada lokasi acara kampanye dialogis di sebuah kediaman pinggir Jalan Lintas Balam, Bangko Pusako, Selasa (27/8).

Jarum jam saat itu menunjukkan pukul 15.30 WIB. Begitu keluar dari mobil, LE, panggilan populernya, langsung disambut dan bersalaman dengan jujaran

Baca Majukan Halaman 2

Napi Mengamuk, Seorang Polisi Terluka

PEKANBARU (RP) - Lembaga Permasyarakan (Lapas) Kelas II A Pekanbaru geger, Selasa (27/8) sore sekitar pukul 16.20 WIB. Pasalnya, Syamsul (40), seorang narapidana (napi) kasus pembunuhan menonoha kabur dan mengamuk membabi-buta menggunakan parang saat akan diamankan. Akibatnya, seorang anggota polisi mengalami luka di bagian tangan akibat sabitan parang dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Baca Napi/Halaman 11

Atan Sengat



Asap Lagi... Asap Lagi

Bile lagi nak tegas dan serius atasi jerbebu ni?

Asap Lagi... Asap Lagi...

Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru redaksi@riapos.co

PROVINSI Riau dilanda kabut asap lagi. Kabut asap tebal akibat pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sempat hilang pertengahan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri lalu, kembali kembali menyelimuti sejumlah daerah beberapa hari terakhir.

Hasil monitoring satelit NOAA pada Selasa (27/8) pukul 16.00 WIB yang dirilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, ditemukan 312 titik panas/api (hot spot) di 10 kabupaten/kota yang diduga penyebab timbulnya kabut asap. Hanya Pekanbaru dan Kepulauan Meranti yang tanpa hot spot.



Penyebaran Hotspot di Riau

Baca Asap Halaman 8



5 Penerbangan Delay, Sekolah Pulangkan Siswa

PEKANBARU (RP) - Terbatasnya jarak pandang akibat kabut asap, mengakibatkan lima penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru mengalami keterlambatan (delay) terbang, Selasa (27/8) pukul 07.00 WIB. Selain itu, dua penerbangan dari Jakarta dialihkan ke bandara terdekat.

Data yang diperoleh Riau Pos dari OIC Bandara SSK II, ada 5 penerbangan delay menuju Jakarta, Medan dan Batam. Sementara dua pesawat Lion Air dan Garuda Indonesia dari Jakarta sempat holding (berputar-putar) di udara hingga akhirnya kedua pilot masing-masing memutuskan memutar kembali ke Bandara dan Medan.

Perubahan jarak pandang cepat sekali. Pagi sekitar pukul 06.00 WIB berada di jarak 700 meter dan dipukul 07.00 WIB berubah jadi 300 meter. Di SSK II

Baca 5 Penerbangan Halaman 8

JUAL MASKER: Seorang warga mencari rezeki di tengah kabut dengan menjual masker di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Foto bawah, jarak pandang terbatas akibat kabut asap sehingga mengganggu penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II, Selasa (27/8/2013).



MANASIK HAJI: Jamaah Calon Haji (JCH) melaksanakan manasik haji di Masjid Agung An-Nur harus menggunakan masker akibat tebalnya kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru, Selasa (27/8/2013).

Baca JCH Halaman 11

JCH Riau 11 Kloter

PEKANBARU (RP) - Sebanyak 4.008 Jamaah Calon Haji (JCH) asal Riau akan diberangkatkan ke Tanah Suci dalam 11 kloter yang tergabung dalam Kloter 4-14 Embarkasi Batam. JCH kloter pertama akan diberangkatkan mulai 12 September mendatang.

Dari 11 kloter tersebut, hanya delapan kloter penuh yang insinyur JCH asal Riau. Sementara

The Legend Meets Urban Soul

OUTLANDER SPORT

PT. PEKAN PERKASA BERLAIN MOTOR

For Your Satisfaction

www.berlainmotor.com | 330 Pekanbaru | 2013 Pekanbaru Phone (078) 888408 | Fax (078) 888413 | Mobile Service (078) 174027

Rusia Ancam Penyerang Suriah

MOSKOW (RP)-Rencana intervensi militer Barat di Suriah menuai kecamaran dari Rusia dan Cina. Moskow memper-

ingatkan, setiap langkah militer akan berdampak sangat besar terhadap stabilitas keamanan regional. Saat ini, Amerika Serikat dan sekutunya memang tengah mempertimbangkan untuk menyerang Suriah. Untuk itu, perlu dituntaskan sejarahnya tentang Lyalys Presiden Basharal-Assad diduga menggunakan senjata kimia saat menyerang para pemberontak. Meski PBB turun tangan untuk menginspeksi dugaan itu, Menlu AS John Kerry sudah men-

yerukan kepada komunitas internasional agar berhati-hati dalam mengambil sikap terkait dengan krisis Suriah. Panduannya, kata dia, harus menggunakan hukum internasional. "Upaya pemertanian jalur Dewan Keamanan dan sekali lagi mencari-cari alasan tanpa dasar untuk mengintervensi militer akan memperburuk kondisi Suriah. Itu akan berdampak kerusakkan parah di Timur Tengah serta Afrika Utara," jelasnya.

Sambungan dari hal. 1

Angka ini lebih tinggi dari pantauan pada hari pukul 05.00 WIB, yakni sebanyak 297 titik. Saat itu Pelalawan terpantau 151 titik, Indragiri Hulu 54 titik, Indragiri Hilir 29 titik, Bengkalis 23 titik, Kampar 20 titik, Kuantan Singingi 10 titik, Siak 6 titik, Rokan Hilir 2 titik dan Rokan Hulu 2 titik. Dumai, Meranti dan Pekanbaru nol. Sementara itu untuk Sumatera terpantau 407 titik.

"Kabus asap yang terjadi ini murni dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa daerah di Provinsi Riau," jelas Staf Analisa BMKG Pekanbaru, Slamet. Untuk jarak pandang pantauan jam per jam, disampaikan Slamet, pada pukul 05.00 WIB itu 2.000 meter. Satu jam kemudian turun menjadi 800 meter dan pukul 07.00 WIB jadi 500 meter. Jarak pandang terbatas justru terjadi pukul 08.00 WIB yaitu 400 meter dan hingga pukul 12.00 WIB terus naik dan mencapai 1.000 meter.

Dijelaskan Slamet lagi, pertumbuhan titik panas juga didukung musim kering saat ini dan pola angin. Di samping adanya dugaan ada campur tangan manusia. "Ada juga pengaruh badai tropis Kongres di laut Cina Selatan, sehingga semua masa udara ditarik ke lokasi badai, membuat cuaca jadi panas dan memudahkan tersulutnya hot spot," jelasnya.

Ketua Kelompok Analisa BMKG, Warli Budi Lestari menambahkan, saat ini BMKG melakukan dua kali monitoring titik panas. "Pagi pukul 05.00 WIB dan petang pukul 16.00 atau 17.00 WIB, jumlahnya meningkat dari pantauan pagi," ujar Warli.

Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo menyatakan, untuk Sumatera, rekor hot spot terbanyak

dipegang Riau, disusul Jambi, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Kondisi ini dipicu musim kemarau dan jumlah ini diprediksi akan terus meningkat karena diprediksi puncak aktifitas pembakaran hutan dan lahan terjadi Oktober. "Oktober adalah puncak dari kebakaran lahan dan hutan di Sumatera, 99 persen akibat dibakar, baik oleh individu maupun kelompok," kata Sutopo kepada Riau Pos di Jakarta, kemarin.

Sutopo menegaskan, peneakan hutan adalah kunci pengendalian pembakaran lahan dan hutan. Penda, PPNS Kementerian Kehutanan, PPNS Kementerian Pertanian, PPNS KLH dan Kepolisian hendaknya makin meningkatkan pengendalian pembakaran lahan dan hutan tersebut. Jika tidak maka jumlah hot spot makin meningkat.

Dua Helikopter Diturunkan Untuk mengatasi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau menurunkan dua helikopter. Informasi itu disampaikan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Kufi Azmi kepada Riau Pos, Selasa (27/8). Menurut dia, helikopter tersebut sudah turun ke beberapa daerah untuk melakukan bombing water.

"Kita sudah turunkan dua helikopter. Satu helikopter ke daerah Pelalawan untuk melakukan bombing water. Sedangkan satu pesawat lagi melakukan pemantauan di titik-titik rawan Karhutla," ungkapnya.

Mantan Kepala Bagian Penerangan Biro Humas Setdaprov Riau itu juga mengatakan selain dua helikopter tersebut, juga terdapat dua helikopter tambahan. Satu helikopter stand by dan satu helikopter lagi dalam kondisi perbaikan. Saat ditanyakan mengenai langkah pemantauan lain, ia mengatakan saat ini proses persiapan hujan buatan sudah

Asap Lagi... Asap Lagi...

mulai dilakikan. Hanya saja pesawat yang akan melakukan hujan buatan masih berada di Palembang.

Menurutnya, proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan diprediksi akan berkurang dalam beberapa hari ke depan. Pasalnya, intensitas bombing water terus dipertahankan di areal yang terbakar. "Setiap harinya pemadaman dari udara dilakukan sampai 50 kali. Helikopter yang disediakan memang dipertuntukkan memadamkan titik-titik api di Riau," ungkap Kufi yang mengaku terus melakukan koordinasi dengan BMKG dan pemerintah kabupaten/botaw Riau.

Ia menambahkan, proses pemadaman dan antisipasi Karhutla tidak hanya dilakukan saat terjadi karhutla. Pasalnya, helikopter yang tersedia stand by akan terus pantau. Diprediksi bulan Oktober mendatang sudah memasuki musim hujan," ujarnya Kufi.

Sementara itu, sehari sebelumnya, Menteri Kehutanan RI Dr H Zulkilifi Hasan meminta aparat kepolisian untuk dapat menindak dengan tegas para pelaku pembakaran lahan dan hutan di Pelalawan. Jika tindakan itu tak dilakukan, kasus Karhutla akan terus terjadi.

"Berdasarakan data yang telah kita sampaikan di Provinsi Riau telah ditekan sebanyak 24 kasus pembakaran lahan dan hutan yang diduga dilakukan dengan sengaja. Namun demikian, saat ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian. Jadi, kita minta pihak kepolisian dapat memproses dan menindak tegas pelaku Karhutla ini dengan hukuman setimpal sesuai dengan pasal 187 KUHP yaitu tentang pembakaran kemerdekaan pasal 170, tanpa ada pembeda bulu," ujar Zulkilifi Hasan saat melakukan kunjungan kerja di PT RAPP, Senin (26/8) lalu.

5 Penerbangan Delay, Sekolah Pulangkan

Sambungan dari hal. 1

kemarin, take off penerbangan pertama sekitar pukul 06.35 WIB normal, meski jarak pandang 700 meter," kata Airport Duty Manager PT (persero) Angkasa Pura II Bandara SSK II, Baiqui kepada wartawan. Disebutkannya, yang diangkut ke Batam penerbangan Lion Air JT388 dan Garuda Indonesia G170 di alihkan ke Medan. "Keduanya dari Jakarta, sempat holding di udara Pekanbaru. Kondisinya cukup parah, minimum tadi pagi (kemarin, red) jarak pandangnya 300 meter. Sehingga untuk kedatangan beraturan, kami sudah koordinasi soal kondisi cuaca dengan maskapai dan untuk landing pesawat diserahkan sepenuhnya ke pilot," jelasnya.

Selain itu, kabut asap juga membuat sesak nafas serta pedih di mata. Dari pengamatan Riau Pos pukul 07.30 WIB di Jalan Garuda Sakti, Pekanbaru, kondisi kabut asap begitu pekat. Begitu juga dengan jalan-jalan protokol. Penerbangan pada dua sangat memisahkan dampaknya. "Asapnya sangat tebal, kalau membayangi-sepa di mata-mata jadi buram dan begitu terasa di hidung," tutur Reji (22), seorang pengendara roda dua yang ditemui Riau Pos saat melewati Jalan Sekeloa-Hatta. Kondisi itu juga terlihat di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN) Susukan Panam, Pekanbaru. Di sebagian besar wilayah Pekanbaru, masih tertutup asap tebal hingga kemarin sore.

Sementara itu beberapa sekolah menengah memproyeksikan peserta didikanya pulang lebih awal pada pukul 06.00 WIB. Salah satunya terpantau Riau Pos di MTS Negeri Andalan dan MAN 2 Model Pekanbaru. Saat Riau Pos mendatang kedua sekolah yang letaknya bersebelahan tersebut pukul 11.00 WIB, kondisinya sudah tidak ada aktifitas belajar-mengajar. "Kami sudah pulang pukul 9.00 Bang," ujar seorang siswa-siswi terlihat pulang kepada Riau Pos. Berdasarkan pantauan Laboratorium Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru, kualitas udara di Kota Betuah terus turun. Bahkan pukul 16.00 WIB kemarin, kualitas udara masuk kategori tidak sehat.

Kepala Labor Udara BLH Kota Pekanbaru, Syarifur mengatakan, menurunnya kualitas udara yang terjadi di sebagian besar wilayah Pekanbaru akibat penebaran lahan serta pembakaran hutan. Labor udara tak mengetahui penyebabnya secara pasti, menurutnya bisa saja terjadi pembakaran lahan atau hutan yang terjadi di luar Pekanbaru. "Tergantung dari arah angin, sehingga perubahan kualitas udara dapat berubah dengan cepat. ISPU hari ini (kemarin, red) 170 kritikal parameter PM 10, kategori tidak sehat," tegas Syarifur.

Dinas Kesehatan (Diskes) Riau mengimbau langkah antisipasi dengan menyediakan 170 ribu masker. Organisasi masyarakat yang ingin membantu masyarakat mendapatkan masker dapat mengambil di Dinas Kesehatan Riau. "Saya siap yang memerlukan masker, baik untuk digunakan sendiri, silakan mengambil di Dinas Kesehatan kabupaten/kota masing-masing," ujar Kepala Diskes Riau, Zainal Arifin usai rapat penganggulangan asap di Kantor Gubernur, Selasa (27/8). Masker yang dimiliki Kabupaten Kota ditambah stok yang ada di provinsi tidak berjumlah 170 ribu masker.

Namun meski sudah 2 hari asap menyelimuti Riau, menurut Zainal, pihaknya belum menerima laporan adanya peningkatan penderita ISPA (gus/ali/ilo/fat/egp/rio/yud/auw*/4/esi/fin)

Kontribusi HTI, Pulp dan Kertas Bagi Pembangunan Indonesia

Pengusahaan atau pemanfaatan hutan alam produksi sejak 1970 sampai dengan 1990 memberikan devisa terbesar kedua setelah migas, dimana hal ini berperan penting dalam mendukung pertumbuhan industri perkerajinan nasional, menyerap tenaga kerja terutama negara-negara tidak terampil dan membuka isolasi daerah-daerah pedalaman yang sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, perlu kehijauan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan produksi melalui pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Pembangunan HTI ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hutan produksi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku industri perkerajinan dan penyediaan lapangan usaha (pertumbuhan ekonomi), penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup, serta mendorong daya saing produk industri perkerajinan (penggergajian, kayu lapis, pulp & paper, meubel) untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Kebutuhan dunia terhadap industri kehutanan di tahun 2030 sekitar tiga kali lebih banyak dibanding tahun 2013. Pemerintah Indonesia telah menetapkan dari 78 juta hektar (60%) digunakan sebagai hutan produksi dan 53 juta hektar (40%) digunakan untuk area konservasi. Dari 78 juta hektar tersebut yang digunakan untuk industri pulp and paper yakni sekitar 10,8 juta hektar. Kontribusi dari industri kehutanan untuk perkembangan

Indonesia dapat menciptakan lebih dari 20 juta mata pencaharian dan 1,3 juta pekerjaan.

Melalui sektor kehutanan, Indonesia bisa menjadi pemain kunci dalam keberlanjutan memenuhi kebutuhan dunia untuk serat dari pohon. Untuk dapat terus berlanjut dan memenuhi kebutuhan perlu dilakukan penanaman hutan terbarukan atau yang lebih dikenal saat ini dengan HTI.

PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) sebagai salah satu pelaku dunia usaha di bidang industri kehutanan HTI menjadi penunjang dalam menjalankan praktik terbaik (best practice) dalam pengelolaan hutan lestari secara bertanggung jawab, dan dikelola dengan melakukan pendekatan termasuk perlindungan terhadap Hutan Bernilai Konservasi Tinggi atau yang lebih dikenal dengan High Conservation Value Forest (HCVF) yang sudah diadopsi sejak tahun 2006 secara sukarela.

Selanjutnya, di tahun 2010 RAPP menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang menerima sertifikasi Manajemen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK PHPL). Investasi sosial, konservasi lingkungan dan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi merupakan bagian terpadu dari nilai-nilai bisnis dan tindakan yang diterapkan RAPP dalam menjalankan bisnisnya.

Saat ini, 19% dari areal konsesi RAPP di semenanjung Kampar dialokasikan

sebagai kawasan lindung Hutan lestari merupakan peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia sebagai bagian dari strategi nasional dalam upaya melakukan program pemerintah. Hal tersebut menjadi kontribusi penting guna penyediaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan serta peningkatan kesehatan dan pendidikan. RAPP sudah meyakini bahwa keberadaannya merupakan bagian dari solusi untuk menjawab tantangan dalam mengembangkan konservasi lingkungan, pembangunan sosial dan ekonomi.

Lebih lanjut lagi hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM-UI) tahun 2010 menyimpulkan selama beroperasi (1999-2010) RAPP telah berkontribusi dalam pembentukan PDB nasional sekitar Rp 75 triliun. Berkontribusi dalam menciptakan pendapatan rumah tangga nasional sekitar Rp 22,3 triliun, dan saat ini mencapai 23,4% muncul di Provinsi lainnya

Kontribusi peningkatan jumlah tenaga kerja RAPP dan perusahaan rekanannya secara rata-rata sekitar 87 ribu orang, yang terdiri dari 64 ribu orang (72,95%) di Riau, dan 23 ribu orang (27,05%) muncul di provinsi lain. Pengeluaran untuk program CSR telah memberikan dampak multiplier effect, bahkan dalam jangka panjang, alokasi pengeluaran program CSR yang tepat sasaran dapat membantu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. (*)



Aktivitas karyawan yang sedang melakukan pemantauan diameter kayu di areal konservasi sekitar hutan Pelalawan, Kabupaten Kerinci.



Salah seorang karyawan sedang melakukan aktivitas pengkajian kebidayaan hutan gambut di areal konservasi.

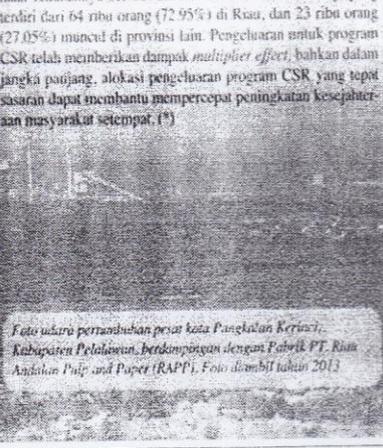


Foto udara pemandangan persawahan di Pangkajene, Kabupaten Pelalawan, berkolaborasi dengan Pabrik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Foto diambil tahun 2013.

SUDUT Pandang



PERUSAHAAN NUNU MENANG TIDAK CUPUK DENGAN CLEAR, TAPI JUGA HARUS CAC, HARUS CLEAN AND CLEAR, CLEAN BERKESKON DENGAN GCG, NUNU DAN PENJAJAR CLEAR BERKUALITAS DENGAN PUBLIC TRUST RUMAH KEPEKAYAKAN PUBLIK.

Dikuto dari Buku Manufacturing Hope: Bise!

DAHLAN ISKAN

SIAPA SAHA SUDUT Pandang



SUBUH	ZUHUR	ASAR	MAGHRIB	ISYA
04.30	12.17	16.31	18.21	19.30



KAMPANYE TERBUKA: Kampanye terbuka pasangan nomor 4 Achmad dan Masrul Kasmy di Duri dipadati massa pendukung, Selasa (28/8/2013).

Achmad-Masrul Programkan 10.000 Doktor

DURI (RP) - Kampanye terbuka pasangan Cagubri-Cawagubri nomor urut 4, H Achmad-Masrul Kasmy di Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat, Rabu (28/8).

Di depan puluhan ribu massa yang memadati lokasi kampanye, pasangan Achmad-Masrul Kasmy dalam orasinya menyatakan.

Baca Achmad Halaman 11

www.majalah.riaupos.co

FAKTUAL, CERDAS, PERTAMA DI RIAU

ISSN 032

SARAT HARAPAN ke-GUBERNUR PILIHAN

Riau segera punya pemimpin baru. Euforia Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) harus diantisipasi karena beragam asa, bertumpuk harapan dan raiyat pemberi amanah, kini menjadi perhatian untuk diterangkan gubernur terpilih.

Atan Sengat

PLN Harus Carikan Solusi

Padamnya dah macam makan obat, the kal sthar...

Sekolah Diliburkan

Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru redaksi@riaupos.co

KABUT asap yang melanda Kota Pekanbaru dan Riau secara umum semakin parah. Bahkan kualitas udara sudah masuk kategori sangat tidak sehat, Rabu (28/8). Kondisi ini men-

jadikan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru meliburkan proses belajar mengajar untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) hingga kelas III mulai hari ini, Kamis (29/8), hingga waktu yang ditentukan kemudian.

Sementara kemarin, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru juga mengakhiri proses belajar mengajar lebih awal di tujuh sekolah yang kondisi kabut asapnya paling parah. Sekolah-sekolah itu umumnya berada di pinggiran kota. Di luar itu, sekolah yang tetap menggelar proses belajar-

mengajar, mewajibkan seluruh peserta didik untuk memakai masker, meskipun di dalam ruangan kelas.

Surat Edaran (SE) Wali Kota Pekanbaru Firdaus ST MT mengenai meliburkan sekolah itu disampaikan

Baca Sekolah Halaman 8



Udara Riau Sangat Tak Sehat

ISPU CAPAI 222, UDARA RIAU DIKATEGORIKAN SANGAT TIDAK SEHAT.

di Riau Rata-Rata HSP Kabut Perut Penghambatan Stagnasi Sumatera

PEKANBARU (RP) - Pusat Penyelidikan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru menilai tingkat Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Riau sudah di atas ambang batas normalnya dan masuk kategori sangat tidak sehat. Berdasarkan pantauan kami di

Baca Udara Halaman 8

TERBAKAR: Api masih menyala di lahan yang terbakar di Desa Rantaubaru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Rabu (28/8/2012). Foto kiri bawah, siswa MTsN Andalan Pekanbaru memakai masker saat belajar di ruang kelas.

PLN Harus Carikan Solusi

PEKANBARU (RP) - Pemadaman bergilir listrik untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang masuk sistem Riau, kini berlangsung siang dan malam hari dengan durasi 2-3 jam. Kondisi ini menjadikan masyarakat menuntut PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR) untuk memperbaiki layanan. Selain itu, mencari solusi agar permasalahan defisit pasokan daya ini bisa lebih cepat teratasi.

Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi mengakui, sudah banyak menerima keluhan kesah warga akibat pemadaman listrik bergilir ini. "Banyak juga keluhan layanan PLN ini sampai

Sistem Riau Defisit 137 MW

Total Pasokan Daya: 268 MW

PLTA Kota Panjans	30 MW
PLTD Riau Power	28 MW
PLTD Agreco Riau	37 MW
PLTD Sawatama	15 MW
PLTD Persema Duriel	34 MW
Balot Prabrat	31 MW
PLTMG Garuda Teluk Lembu - Kawigoro	23 MW
Transfer dari Sumbagsei	64 MW

Defisit 137 MW

Defisit Riau Total Kumulatif 77 MW

Pemadaman bergilir untuk Pekanbaru 60 MW



Saham Pindah ke Obligasi dan Deposito

JAKARTA (RP) - Pasar keuangan di Indonesia terus meremang. Aliran dana dalam jumlah besar tidak hanya terjadi dari Indonesia ke luar negeri, namun juga dari instrumen investasi ke instrumen investasi lain di dalam negeri.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, dalam beberapa hari terakhir terjadi pergerakan dana dalam jumlah besar dari pasar modal atau pasar saham, ke pasar obligasi pemerintah (surat utang negara/SUN) dan deposito perbankan. "Istilahnya flight to quality. Ini yang membuat IHSG (indeks harga saham gabungan) tertekan dalam beberapa hari terakhir," ujarnya saat paparan paket kebijakan ekonomi di Kantor Ditjen Pajak, Rabu (28/8).

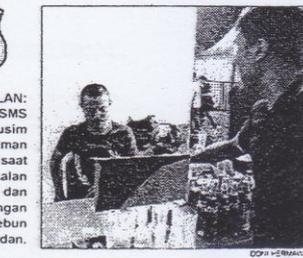
Baca Saham Halaman 2

Perjuangan Pemain PSMS Medan setelah Berbulan-bulan Tak Bergaji Jadi Kuli Bangunan dan Buka Warung Kecil-kecilan

Karena berbulan-bulan gaji tak dibayar, para pemain PSMS Medan hidup merana. Ada yang terpaksa beralih profesi sebagai kuli bangunan, jaga warung, dan menjadi satpam. Mereka tak peduli. Yang penting bisa mendapatkan uang untuk makan sehari-hari anak-istri.

Laporan MUHAMMAD AMJAD, Medan

AHAD pagi (25/8) seorang sekuriti terlihat mondar-mandir mengontrol kondisi di lantai 2 Bank Sumatera Utara (Sumut). Sesekali dia berhenti sembari melihat catatan yang dibawanya. Dengan teliti tiap ruangan dibuka dan diperik-



BERJUALAN: Pemain PSMS Medan musim lalu harus berjualan makanan dan minuman ringan di Stadion Kebun Bunga, Medan.

sebenarnya bukan anggota satuan pengamanan (Satpam) "biasa". Melainkan anggota sekuriti yang sebelumnya berprofesi sebagai pemain sepak bola profesional. Ya, dia adalah Irwin Ramadhana, penjaga gawang PSMS Medan. Kesigapan dan kejiwaan yang menangkap bola di lapangan hijau kini ditunjukkanannya saat menjaga keamanan gedung bank yang terletak di Jalan Imam Bonjol 18, Kota Medan, tersebut.

Saat RPG memergokinya, dia tampak terkejut. Entah karena malas bertemu wartawan atau karena malu. Tapi, setelah RPG berbahasi sejenak, Irwin bersedia diwawancarai. "Begitulah saya, kalau tidak berlatih dan bermain bola,

Baca Jadi Halaman 9

PERFORMA TINGKAT UNTUK BISNIS ANDA

STRADA

PT. PEKAN PERKASA BERLIAN MOTOR

www.riaupos.co

Sekolah Diliburkan Sambungan dari hal. 1

Kabag Humas Ariensan Rozie: "Terhitung besok (hari ini, red), mereka diliburkan sampai waktu yang ditentukan kemudian..."

Ditilik Pekanbaru Majelis mengatakan, instruksi meliburkan sekolah tersebut disampaikan Ditilik melalui short message service (SMS)...

guru siswa SMPN 6 Pekanbaru, Harum (14). "Ya, sudah pulang dari pukul 09.00 tadi. Karena asap sudah reda..."

Jangan tugas yang telah diberikan guru mata pelajaran," tutur Feri. Setelah mengikuti pelajaran, pada jam istirahat pertama mahasiswa...

anggota. Sementara sekolah di luar itu, meski proses belajar dan mengajar tetap berlangsung, siswa diwajibkan menggunakan masker...

Rekomendasi Dinas Kesehatan. Adapun rekomendasi untuk meliburkan sekolah itu disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau...

"Ya kalau untuk penerapannya bukan kewenangan kita. Itu tergantung keputusan Dinas Pendidikan kabupaten/kota..."

Sambungan dari hal. 1

beberapa daerah seperti Pangkajene, IPU sudah mencapai 222 atau dikategorikan sangat tidak sehat, ungkap Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera, Ir M Ilham Malik MS...

udara yang bersifat meracikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bias menimbulkan keracunan pada tumbuhan ataupun nilai estetika...

gan di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II pun kaan. Satu penerangan Bandara Tiger Jakarta-Pekaburu terpaksa mengalihkan pendaratan (divert) ke Bandara Kudatama, Medan...

ke suya, jadi saya minta tolong ke PLN. Tolong dong solusinya," pinta Ayat. Diomati Ayat, saat PON XVIII lalu, PLN bisa tidak padam selama 160 hari. Tentu hal seperti ini harus bisa dihindari lagi...

PLN Harus Carikan Solusi. Dia menentokan, usaha konveksi, laundry, industri kecil menengah, usaha kuliner dan beberapa usaha lainnya yang tidak bisa terlepas dari aspek listrik...

mad Fitri. Kendati demikian, pelayanan publik yang tergolong sentral tersebut perlu mendapatkan perhatian ekstra. Tunggu Pembangkit Baru Di bagian lain, PLN WRKR huny bisa menunggu berpersiapannya dua pembangkit baru yakni PLTU Teluk Sirih di Sumbar dan PLT-MC Balai Pungut, Duri untuk mengatasi kekurangan pasokan daya di sistem Riau...

Kondisi itu diakui Manajer Teknik PLN WRKR, Pinar Hutapea bersama Deputi Manajer Bidang Komunikasi dan Humas, Syaiful. Keduanya mengatakan, pembangkit Teluk Sirih 110 MW di Bangas, Sumbar akan beroperasi 10 September mendatang. Sementara Pembangkit Ombilin Unit I 100 MW diprediksi beroperasi Oktober...

Udara Riau Sangat Tak Sehat

udara yang bersifat meracikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bias menimbulkan keracunan pada tumbuhan ataupun nilai estetika...

74 titik, Stak 12 titik, Kampur 48 titik, Indragiri Hulu 2 titik, Indragiri Hilir 25 titik dan Kuantan Singingi 44 titik. Jumlah ini naik 253 titik dari tahun sebelumnya yang mencapai 912 titik. Tapi, angka pertumbuhan ini tidak terpantau. Namun, kami tidak punya agenda untuk mengungkap hasil monitoring kualitas udara yang terus jalar-malar, jelas Samat.

Dari data BMKG, pantauan kemarin tertinggi untuk Agustus. Sebelumnya tertinggi terjadi 4 Agustus kemarin, 258 titik. Data tersebut diolah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Rabu (28/8) malam, BNPB hanya mencatatkan 27 titik. Angka ini turun drastis dibandingkan pantauan 4 spot pagi seperti di rilis BMKG Pekanbaru. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, saat Sumatera jumlah titik tertinggi tercatat di Aceh, 97 titik di Riau, katanya, menduduki...

Untuk pemantauan kerahulan di Riau, Sutopo menyebutkan, kemarin BPED dilampangi BNPB Riau telah melakukan operasi pemompaan air hujan buatan, dan operasi pemadaman larat. "Hari ini kemarin sudah dilakukan operasi pemadaman larat dengan 1 helikopter Bell dan 1 helikopter Sikorsky yang mampu mengangkut 4.200 liter air sekali terbang," ujarnya.

Gangguan Penerbangan. Kabut asap tebal kemarin sempat membuat jarak pandang hanya 300 meter. Akibat penerban-

gan di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II pun kaan. Satu penerangan Bandara Tiger Jakarta-Pekaburu terpaksa mengalihkan pendaratan (divert) ke Bandara Kudatama, Medan. Satu penerangan Sili Air terpaksa kembali pulang ke Singapura. Sementara enam penerangan lain delay yakni Garuda Indonesia dalam jurusan Jakarta-Pekaburu, Lion Air Jakarta-Pekaburu, Air Asia Medan-Pekaburu, Air Asia Bandung-Pekaburu, Sriwijaya Batam-Pekaburu dan Mandala Tiger Jogjakarta-Pekaburu. Sedangkan dari penerangan rute Selangang dan penerangan rute "Kondisinya masih seperti sebelumnya, ada yang divert, dan juga yang delay di Bandara, dan juga yang memunda penerangan ke Pekanbaru. Namun kali ini ada satu perubahan luar negeri yang kembali lagi dan membuat jadwal penerbangan kacau," ujar Airport Duty Manager PT AP II Bandara SSK II Pekanbaru, Bakumi (gus/ekg/epg/ah/ilo/fat/3/*4)

gan di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II pun kaan. Satu penerangan Bandara Tiger Jakarta-Pekaburu terpaksa mengalihkan pendaratan (divert) ke Bandara Kudatama, Medan. Satu penerangan Sili Air terpaksa kembali pulang ke Singapura. Sementara enam penerangan lain delay yakni Garuda Indonesia dalam jurusan Jakarta-Pekaburu, Lion Air Jakarta-Pekaburu, Air Asia Medan-Pekaburu, Air Asia Bandung-Pekaburu, Sriwijaya Batam-Pekaburu dan Mandala Tiger Jogjakarta-Pekaburu. Sedangkan dari penerangan rute Selangang dan penerangan rute "Kondisinya masih seperti sebelumnya, ada yang divert, dan juga yang delay di Bandara, dan juga yang memunda penerangan ke Pekanbaru. Namun kali ini ada satu perubahan luar negeri yang kembali lagi dan membuat jadwal penerbangan kacau," ujar Airport Duty Manager PT AP II Bandara SSK II Pekanbaru, Bakumi (gus/ekg/epg/ah/ilo/fat/3/*4)

Anugerah Sagang 2013. YAYASAN SAGANG tahun 2013 ini kembali akan memberikan Anugerah untuk Seniman/Budayawan Pilihan, Buku Pilihan, Karya Non-Buku Pilihan, Institut/Lembaga Seni-Budaya Pilihan, Seniman/Budayawan Serantau Pilihan, Karya Jurnalistik Pilihan, dan Karya Penelitian/Budaya Pilihan. Bersamaan dengan ini kami menjemput Tuan dan Puan untuk berpartisipasi mengikuti pengisian calon dengan kriteria sebagai berikut:

Selamat Ulang Tahun RS AWAL BROS Pekanbaru. 15 tahun sudah RS Awal Bros berdiri, tidak sedikit pula halangan dan rintangan yang dihadapi, namun semua ini justru membuat rumah sakit menjadi lebih baik dan dewasa. RS Awal Bros mendapatkan sertifikasi ISO dari tahun 2006 mendapatkan sertifikasi DEPKES dengan 16 Pelayanan serta penghargaan lainnya. Selain itu juga mendapatkan penghargaan dari MARPPLUS yaitu Indonesia Service To Care Champion 2013. Hingga genap 15 tahun bertepatan lagi akan mencapai sertifikasi JCI. Kini bertepatan RS Awal Bros Pekanbaru telah menjadi Rumah Sakit rujukan Se-Sumatra.

VILLAGE
Panam ■ Sudirman
Royal Permata Hijau

Dapatkan Rumah Kost Mewah Fasilitas Bintang 5 hanya Rp83.600.000,-
Stok Terbatas

Hubungi Marketing:
■ 0812 7051 8022
■ 0823 8751 6210
■ 0812 6876 4478
■ 0813 7888 0009
■ 0852 6559 6868

PEKANBARU

Belum Ada Bukti Kuat Dugaan Gratifikasi Jembatan Timbang



EDDY RAKAMTO

PEKANBARU (RP) — Kejaksan Tinggi (Kejati) Riau masih terus menyelidiki dugaan gratifikasi yang terjadi di lima jembatan timbang yang ada di Riau. Kasus ini baru akan dinaikkan statusnya ke penyidikan jika sudah didapati bukti-bukti kuat terkait gratifikasi tersebut.

Hal ini diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Eddy Rakamto kepada wartawan, Rabu (28/8). "Masih dalam penyelidikan. Kita masih meneliti dan memeriksa berkas-berkasnya. Belum ada bukti yang kuat untuk meningkatkan status kasus ini," ujarnya.

Dalam kasus ini upaya pemanggilan untuk diperiksa sudah pernah dilayangkan kepada tiga orang pejabat di Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau, pada

■ Baca *Belum* Halaman 32

TEMBILAHAN



SALAMI WARGA: Calon Bupati Inhil HM Wardan menyalami warga Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Kerintang, Rabu (28/8/2013).

Warohmah Masih Blusukan di Zona 3

TEMBILAHAN (RP) — Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) periode 2013-2018 nomor urut 1, HM Wardan-H Rosman Malomo (Warohmah), Rabu (28/8) masih blusukan di beberapa titik zona 3.

Hari terakhir kampanye di zona tersebut, pasangan yang akrab disapa Warohmah itu mengunjungi Desa Nusantara Jaya, Kuala Lemang dan Kelurahan Kotabaru Seberida, Kecamatan Kerintang. Pasangan yang diusung Partai Golkar, PDI-P, PKS, dan PAN tersebut sempat menyinggahi beberapa rumah warga.

■ Baca *Warohmah* Halaman 29

Cagubri Dituntut Peduli



BAGIKAN MASKER: Seorang pendemo dengan mengenakan kostum harimau Sumatera ikut memberikan masker kepada pengendara yang melintas di dekat Tugu Zapin, depan kantor Gubernur Riau, Rabu (28/8/2013).

Laporan EKA GUSMADI
PUTRA, Pekanbaru
ekagusmadi@riaupos.co

ada yang menggunakan atribut harimau Sumatera.

Demonstrasi yang terdiri dari

BENCANA asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali terjadi di Provinsi Riau haruslah ditangani oleh pemimpin yang tegas. Terutama dalam penegakan hukum terhadap pemilik konsensi di areal kerjanya yang ditemukan titik api.

Hal ini disampaikan oleh sejumlah organisasi lingkungan dalam aksi mereka, Rabu (28/8) di depan Kantor Gubernur Riau. Dalam aksi, kemarin, para pendemo juga memberikan masker kepada pengendara yang melintas di jalan Sudirman, Pekanbaru. Beberapa di antara pendemo juga

Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikahar) Riau, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, dan Green Peace tersebut menuntut seluruh calon Gubernur Riau dan wakilnya harus memberikan kepedulian lebih terhadap lingkungan.

"Gubri terpilih nanti, siapapun, haruslah peduli dengan lingkungan dan merawat kelestarian alam demi kesinambungan hidup anak cucu ke depannya," ujar juru bicara Green Peace, Rusmada Maharudin.

Jika sudah berkomitmen untuk sama menjaga lingkungan, lanjutnya diharapkan

■ Baca *Cagubri* Halaman 32



Lagi, Dua Napi Teroris Diamankan di Brimob

PEKANBARU (RP) — Dua orang narapidana (napi) kasus terorisme yang kabur dari Lembaga Perwasarakan (Lapas) Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara dan berhasil ditangkap, Rabu (28/8) kemarin, saat ini diamankan di Mako Brimob Polda Riau. Hal ini dilakukan hingga keduanya diberangkat-



HERMANSYAH

kan ke Jakarta. Dua orang napi teroris yang baru berhasil diamankan ini adalah Abdul Gani Siregar dan Nibras. Keduanya merupakan pelaku perampokan Bank CIMB Niaga, Medan dan pelaku perampokan Polsek Hamparan Perak, Medan yang terjadi

■ Baca *Lagi* Halaman 32

Dua Perampokan di Selasa Malam

1 Perampokan di di RT Kampung Jawa, Desa Batang Kumuh, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Selasa (27/8) sekitar pukul 23.30 WIB. Korban El Purba (71), mantan TNI ditembak di bagian dada sisi kiri tembak ke punggung. Hingga kini korban masih kritis di RSUD Pasirpangaran. Perampok membawa lari uang Rp5 juta lebih dan satu unit handphone



2 Perampokan di Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Selasa (27/8) sekitar pukul 21.00 WIB. Korban Jumris (38) dan istrinya Sunarkit (32). Perampok berhasil membawa uang senilai Rp15 juta, kalung emas 7 mayang, dua buah cincin seberat 2,5 mayang, satu anting setengah mayang, satu untai kalung 10 gram dan tiga set rokok.

Perampok Bersenpi Marak Lagi

RAMBAH (RP) — Aksi perampokan dengan menggunakan senjata api (senpi) di wilayah Riau marak lagi. Kali ini, dua perampokan bersenpi terjadi Selasa (27/8) malam di dua daerah berbeda yaitu di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Indragiri Hulu.

Di Kabupaten Rohul, seorang mantan anggota TNI, El Purba (71) ditembak perampok, Selasa (27/8) sekitar pukul 23.30 WIB. Korban ditembak di bagian dada sisi kiri tembak hingga ke punggung saat ia berada di rumahnya di RT Kampung Jawa, Desa Batang Kumuh, Kecamatan

Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu.

Informasi yang dirangkum Riau Pos, Rabu (28/8), kondisi korban masih kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasirpangaran. Korban sebelumnya menjalani perawatan di Puskesmas Dalu-dalu, karena tak sanggup menemani, makanya dibawa ke RSUD Pasirpangaran.

Kepala RT Kampung Jawa, Rudi mengatakan, korban ditemukan warga sudah dalam kondisi kritis dan meringis kesakitan. Menurut Rudi, dari hasil komunikasi

dengan korban, perampok itu selain menembaknya juga membawa uangnya sekitar Rp5 juta lebih, kemudian handphone-nya juga dibawa. Pada saat ditembak, korban hanya sendirian di rumah. "Saya sudah dia berobat, tapi karena korban menjawab tidak punya duit, kami cari karikan pinjaman ke rumah tetamunya. Setelah mendapat uang, El Purba langsung dibawa ke Puskesmas," jelas Rudi.

Kepdtes Rohul, AKBH H Onny Trimurti Nugroho SESik MH melalui Kasat Reskrim AKP 5 Tanjung menjelaskan.

■ Baca *Perampok* Halaman 32

Terdakwa Janji Kembalikan Uang

PEKANBARU (RP) — Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutban) Indragiri Hilir (Inhil) Ir Syafrinal Hedi MM duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Tiro Tuta Air dan Pengaturan Tata Air Inhil dengan kerugian negara sebesar Rp5,4 miliar,

Rabu (28/8) dalam agenda mendengarkan keterangan terdakwa. Kepada majelis hakim, ia mengaku menyesal dan berjanji mengembalikan uang yang diterimanya. "Saya menyesal. Sebelum tuntutan dibacakan, saya akan

■ Baca *Terdakwa* Halaman 32

KASUS KORUPSI

BAHAN PELAPIS JOK MOBIL KUALITAS TERBAIK DENGAN STANDAR INTERNASIONAL

MBlechi

Dapatkan diskon 17%
- Rawat Inap, Rawat Jalan & IGD dari total tagihan (kecuali obat & alat kesehatan)
- Paket General Medical Check Up (Basic, Silver, Gold, Platinum & Eka Star)

Periode s.d. 31 Agustus 2013.
Promo tidak dapat digabungkan dengan bentuk promo lainnya.

Informasi : (0761) 698 99 99

EKA HOSPITAL

PROMO MEDICINA MERDEKA

Dapatkan diskon 17%
- Rawat Inap, Rawat Jalan & IGD dari total tagihan (kecuali obat & alat kesehatan)
- Paket General Medical Check Up (Basic, Silver, Gold, Platinum & Eka Star)

Periode s.d. 31 Agustus 2013.
Promo tidak dapat digabungkan dengan bentuk promo lainnya.

Informasi : (0761) 698 99 99

MEDICAL CHECK UP LEBARAN

Medical Check Up Lebaran
Rp. 799.000,-

Medical Check Up Lebaran for Kids
Rp. 299.000,-

Periode s.d. 30 November 2013
Berlaku untuk Pasien Umum, Jaminan Asuransi dan Perusahaan
Medical Check Up : (0761) 698 99 95

THE SAMEDAY SERVICE
2012 CHAMPION ON COURIER SERVICE | Pekanbaru Service Excellent Award (PkSEA) 2012

Kami adalah sebuah kecepatan dan ketepatan untuk Anda.

Tiki
www.tiki-online.com

SELALU TELPON KAMI: (0761) 56 56 56

Agan Utama Pekanbaru : Jl. Rambutan II No. 17 Telp. (0761) 565656, Fax. 0761-561620 | Konter Utama Pekanbaru : Jl. Teuku Umar No. 23 | KCP Rumbai : Jl. Sembilang No. 135

PEKANBARU

Pameran Khusus Permainan Rakyat Dibuka

PEKANBARU (RP) — Pameran khusus permainan rakyat tajanan Museum Daerah Sang Nila Utama dibuka hari ini, Kamis (29/8) oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Said Syarifuddin.

Pameran yang kegiatannya difokuskan di Museum, menurut Yoserial Zein selaku Kepala Museum menyebutkan tema yang dikemas tahun ini adalah Merajut yang kusut, menuju Riau tak risu. "Tema ini berlangsung dari 29 Agustus-7 September mendatang," ucap Yoserial kepada Riau Pos (28/8).

Ditambahkannya, dalam pembukaan nanti akan diperlihatkan sebuah permainan rakyat tradisional Riau yang hampir sudah tidak terdengar lagi sebagai penanda persembahan acara dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. "Selain itu juga akan tampil grup musik Ghazal dalam pembukaan nantinya," jelas Yoserial.

Pada siang harinya, Yoserial menyebutkan pihak museum Sang Nila Utama akan menerima kunjungan dari Brimob Riau. Dalam kunjungan tersebut, Brimob Riau akan menghamburkan prasasti sejarahnya yang beradab Brimob di Riau ini. "Itu diagendakan siang harinya, setelah pembukaan," katanya.

Terkait dengan persiapan, Yoserial menjelaskan sedang dalam tahap penyelesaian. Bahkan pihak Museum juga sudah membuat replika berbagai properti permainan tradisional agar para pengunjung nantinya dapat langsung mempraktikkan permainan tersebut. "Kita sudah replikanya karena kalau yang asli, takutnya sudah rapuh," pungkasnya mengakhiri. (6/dae)

DKR Taja Rarak Musik Se-Riau

PEKANBARU (RP) — Melaksanakan program kerja 2013, Dewan Kesenian Riau (DKR) menaja kegiatan Rarak Musik se-Riau. Kegiatan ini direncanakan pada 26-28 September 2013, bertempat di Anjung Seni Idrus Tintin, Kawasan Bandar Seni Raja Ali Haji (Bandar Serai), Pekanbaru.

Ketua Panitia Eri Bob didampingi sekretaris Zalfandi Matroek, menyampaikan kegiatan ini menjelaskan, helat Rarak Musik ini merupakan program rutin tahunan DKR. Ini memang kegiatan rutin DKR. Hanya saja, disebarkan berbagai kendala, dalam beberapa tahun ini kegiatan Rarak Musik ini tak dilaksanakan. Jadi, tahun ini kembali kita gelar," jelas Eri Bob.

Menurutnya lagi, kegiatan ini akan diikuti grup-grup, kelompok, atau sanggar-sanggar yang ada di Riau. Kita berharap, minimal kabupaten/kota yang ada di Riau mengikutsertakan satu utusan untuk mengikuti helat ini. Artinya, bila satu daerah satu utusan, paling tidak dua atau tiga musikus yang akan dilombakan dalam helat ini.

"Untuk pengiriman utusan, kita bekerja sama dengan dewan kesenian kabupaten/kota yang ada di Riau. Kita minta, kawan-kawan DK kabupaten/kota berpartisipasi aktif, untuk dapat mengirimkan utusannya mengikuti kegiatan ini," tambah Eri Bob.

Untuk konsep pengkaryaan, dijelaskan Eri Bob, Rarak Musik ini menawarkan karya musik garapan baru atau kontemporer dengan tetap berpijak pada musik-musik Melayu. "Riau ini kaya dengan kasnah musik-musik. Kembalannya kasnah tersebut dalam garapan baru," jelasnya. Untuk kategori yang dilombakan, dijelaskan Eri Bob, ada tiga kategori, yaitu, penyaji terbaik yang dibagi menjadi penyaji terbaik I, II, III dan tiga penyaji terbaik harapan non-peringkat. Kemudian kategori penata musik atau komposer terbaik dan penata musik atau komposer terbaik.

Ditambahkan Eri Bob, masing-masing pemenang akan mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan, tropi, dan piagam. Selain itu, panitia juga membantu akomodasi, konsumsi, dan bantuan transportasi bagi peserta luar Kota Pekanbaru. (6/dae)

Lagi, Dua Napi Teroris Sambungan dari hal. 21

beberapa waktu lalu. Mereka ditangkap tim gabungan Polda Riau dan Detasemen Khusus (Denkubs) 88 Mabes Polri di Kilometer 68 Desa Tasik Serai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis.

Sebelum kedua orang ini, dua napi teroris lainnya yang juga penghuni Lapas Tanjung Gusta tersebut adalah, Agus Sunyoto alias Syaifuruddin alias Gaepok (28) dan Ridwan alias Ismail (52). Keduanya dibekuk Tim Denus 88 yang diturunkan, Kamis (22/8) pagi sekitar pukul 05.30 WIB saat berada di Jalan Bambu Kuning, Pasar Minggu, Kabis, Kabupaten Siak.

"Dengan tertangkapnya dua napi teroris ini, maka sudah empat napi teroris yang kabur dari Lapas Tanjung Gusta berhasil ditangkap. Tinggal satu napi teroris lagi yang masih dibekuk," ungkap Kabid Humas Polda Riau, AKBP Rakhmatulillah SIK kepada wartawan, Rabu (28/8).

Abdul Gani dan Nibras, jesis Kabid Humas saat ini diinapkan di Makro Brimob Polda Riau, Pekanbaru. "Rencananya, hari ini (kemarin, ref) akan dibawa ke Jakarta. Mereka akan bergabung dengan dua lainnya yang sebelumnya tertangkap," lanjut Hermansyah.

Dua napi teroris yang ditangkap di Desa Tasik Serai ini, berhasil dibekuk setelah aparat melakukan pemeriksaan terhadap dua napi teroris yang sudah lebih dahulu diinapkan, Agus Sunyoto alias Syaifuruddin alias Gaepok dan Ridwan alias Ismail. Dua orang ini sudah diberangkatkan ke Jakarta, Selasa (27/8). (ad)

Cagubri Dituntut Peduli Sambungan dari hal. 21

hutan yang lebih memperhatikan permasalahan kebakaran hutan saat ini karena kemampuannya penanganan kebakaran terhadap pemilik konsesi di areal kerjanya yang ditunjukkan oleh api.

Dipaparkan Rusmadi, memang terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam Undang-Undang (UU) No 41 Pasal 49 jelas bahwa tanggung jawab terhadap pencegahan dan perindungan kawasan konsesi yang diberikan izin haruslah tegas.

"Sebenarnya ketika ada titik api di wilayah konsesi sudah bisa dibawa ke ranah hukum. Namun seperti kita ketahui sebelum ada peradilan tuntas terhadap pelaku pembakaran baik perorangan maupun perusahaan. Hanya saja, prosedur-pengadilan saja," ujarnya. (y/s)

Dana BOS Masih Bermasalah

Laporan EKA GUSMADI PUTRA, Pekanbaru ekagusmadi@riaupos.co

PROGRAM Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga sekarang di Provinsi Riau masih saja bermasalah dan menjadi kendala bagi sekolah-sekolah dalam memanfaatkan anggaran yang disediakan dari alokasi pemerintah pusat tersebut. Utamanya tin penanggulangan dan pengelolaan dana BOS.

Beberapa kendala yang di-

rangrum Riau Pos dari keterangan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, seperti keterbatasan tenaga yang mengerjakan laporan portangungjawa-penggunaan anggaran. Juga masalah program terhadap dana yang diterima di sekolah-sekolah sering tidak berjalan.

"Permasalahan yang terjadi memang bukan disebabkan oleh faktor kesengajaan. Ini karena terbatasnya tenaga yang mengerjakan laporan itu. Memang masalah masih

ada hingga kini," ujar pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi Riau Hadimiharja. Pernyataan tersebut disampaikan usai membuka workshop BOS untuk kepala sekolah dan bendahara SMP terhadap penggunaan anggaran BOS, Selasa (27/8) malam lalu.

Ditambahkannya, selain itu juga ada administrasi yang banyak menjadikan pengelola BOS kesulitan. Utamanya di daerah

terpencil sehingga mengakibatkan keterlambatan. "Kita berharap kalau memang ada yang tidak mampu melaksanakan program sesuai rentang waktu yang ditentukan, harus dicari-cari alternatifnya," tambahnya.

Bahkan, terkait permasalahan menjadi kendala tersendiri di daerah. Selusinnya, lanjut Hadi bisa dilakukan dengan langkah koordinasi. Bisa dengan mendukung bersama komite

sekolah yang disarankan solusi apa yang menjadi kendala di sekolah terkait.

Pada kegiatan yang diada Disdik Riau diikuti 220 peserta dari 12 kabupaten/kota se-Riau. Terdiri dari kepala sekolah dan bendahara SMP negeri maupun swasta di Provinsi Riau. "Mudah-mudahan pencapaian dari kegiatan ini bisa memberikan kemudahan kepada para guru dan kepala sekolah agar lebih maksimal dalam menjalankan BOS," tutupnya. (y/s)

ADVERTORIAL PEMPROV RIAU

Riau Berpotensi Budidayakan Ikan Lahan Gambut

PROVINSI Riau yang memiliki lahan gambut terbesar di Indonesia mencapai lima juta hektare lebih memiliki potensi untuk mengembangkan budidaya ikan lahan gambut. Hal ini terungkap dalam fokus group diskusi (FGD) pengembangan potensi investasi sektor perikanan budidaya lahan gambut di Riau yang dilaksanakan di Hotel Mutiara Merdeka, Rabu (28/8).

Forum diskusi ini secara resmi dibuka Asisten I Setdaprov Riau Emrizal Pakis. Dikatakan Emrizal, setelah dimakarkannya Kepri dari Provinsi Riau maka perikanan dari sumber perikanan laut semakin berkurang. "Saat ini tinggal 10-11 persen perairan kita setelah Kepri lepas, karena itu Riau harus mengembangkan potensi perikanan dari sektor lain salah satunya melalui budidaya perikanan darat seperti kolam ikan dan keramba," ujar Emrizal.

Forum diskusi yang ditaja Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Riau ini dihadiri seluruh dinas perikanan kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Hadir pada kesempatan itu Kepala BPMPD Riau Edizur, Kadis Perikanan Riau Prof Ir Irwan Eleni dan perwakilan BPPT RI Dr Ir Bambang Setiadi.



BUKA DISKUSI: Asisten I Setdaprov Riau Emrizal Pakis membuka diskusi pengembangan potensi investasi sektor perikanan budidaya lahan gambut, Rabu (28/8/2013).

sarkan hasil kajian Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI sekitar 5,7 juta hektare wilayah Riau merupakan kawasan kesatuan hidrologis gambut atau sekitar 64 persen dari luas wilayah Riau. Dari

kawasan itu terdiri dari 1,7 juta hektare kawasan lindung gambut dengan kedalaman 12 meter dan 4 juta hektare kawasan budidaya gambut. Kawasan kubah gambut ini tidak bisa diolah tapi harus

dilestarikan dan dijaga. Menurut Emrizal, karena luasnya lahan gambut di Riau budidaya perikanan lahan gambut sangat potensial untuk dikembangkan. Selain menambah incam perikanan

masarakat budidaya perikanan lahan gambut ini juga bisa menjaga kelestarian lingkungan sehingga tidak terjadi kebakaran lahan gambut yang bisa menimbulkan berbagai dampak kerusakan lingkungan seperti kabut asap dan kekeringan.

"Potensi perikanan paling besar berada di laut Cina Selatan dan nelayan kita sangat kesulitan untuk menangkap ikan di sana. Di Riau yang bisa dikembangkan adalah budidaya keramba dan budidaya perikanan darat melalui kolam ikan," terangnya.

Saat ditanya mengenai daerah manasaja yang memiliki potensi untuk budidaya perikanan lahan gambut, Emrizal menjelaskan Kabupaten Bengkalis, Rohil, Kampar dan Inhil.

Sementara itu kepala badan BPMPD Riau Edizur kepada Riau Pos menjelaskan, peserta yang ikut dalam diskusi tersebut selain dinas perikanan kabupaten/kota, perguruan tinggi juga dilibatkan.

"Dengan diskusi ini ke depannya lahan gambut ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dari diskusi ini diharapkan nantinya bisa ditentukan daerah potensial untuk pengembangan budidaya perikanan lahan gambut," jelasnya. (adv/h)

Forum Kemitraan Pemerintah-Pers Hadirkan Bagir Manan



MARASUMBER: Ketua Dewan Pers Bagir Manan (kiri) hadir dalam diskusi Forum Kemitraan Pemerintah - Insan pers, Rabu (28/8/2013).

PEKANBARU (RP) — Dialog Forum Kemitraan Pemerintah dan Insan Pers menghadirkan Ketua Dewan Pers Bagir Manan, Rabu (28/8) di RRI Pekanbaru. Forum Kemitraan Pemerintah dan Insan Pers yang mengusung tema "Membangun Kemitanan antara Pemerintah dan Insan Pers" juga menghadirkan pengamat komunikasi Riau Timbulunan dan Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Kewah kepala Harofie PDE Riau Ahmadlyah Harofie. Selain itu terlihat hadir perwakilan insan pers dari media cetak, audio visual dan elektronik serta perwakilan instansi pemerintahan.

Dalam diskusi, Bagir menjelaskan bahwa komunikasi merupakan salah satu kunci kemitanan antara pemerintah dan insan pers. Kondisi ini diperlukan dalam menyelesaikan tugas-tugas insan pers dengan peran instansi pemerintah.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung ini, pemerintah dan insan pers sebagai media pertukaran pendapat. Begitu juga dalam memberikan informasi ke publik sesuai fakta dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Untuk itu perlu keterbukaan informasi. Kita punya UU tentang itu. Hanya saja, jangan sampai keterbukaan informasi menimbulkan gangguan kebebasan umum, atau mengganggu fungsi negara. Dengan pertimbangan itu, prinsip kemitanan harus jelas, apa yang boleh dan tidak boleh. Sehingga dapat dipastikan tanggung jawabkan, mengepalkan prinsip kejujuran dan integritas," paparnya.

Dia menilai, pers memiliki fungsi penting sebagai kontrol sosial. Dia mencontohkan, seorang pemki pernah mengatakan kritik diperbolehkan untuk menjaga yang terbaik menjalankan tugas secara lenar dan jujur dari kesalahan. (rio)

Di api laras panjang ke kepala istri korban seraya mengancam agar kritik berterbunyi. Pelaku kemudian keluar dari kamar dan kembali mengambil tiga s-p rokok, yakni Dji Sam Su, Gudang Garam Filter serta Sampoerna Mild. Pelaku juga membawa kabur semapan angin milik korban.

Akibat kejadian itu korban mengalami kerugian berupa uang tunai senilai Rp 15 juta, kalung emas 7 mayam, dua buah cincin senilai 2,5 mayam, satu anting seterbag mayam, satu anting kalung 10 gram dan tiga sloop rokok. "Kasus ini masih dalam penyelidikan, terutama melacak pelaku," ujarnya. (Har/Kas)

Sambungan dari hal. 21

secara intensif, pihaknya terus melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara (TKP). "Kita masih tahap lirik," ujarnya.

Perampokan di Inhil Peristiwa perampokan juga dialami oleh Jumino (38), warga Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Selasa (27/8). Akibatnya, korban mengalami kerugian mencapai Rp40 juta.

Tiga perampok yang mengganggunya senapi 1 unit laras panjang dan 1 unit laras pendek.

Perampok Bersenpi Marak Lagi

Honda Megapro. Satu di antaranya turun dari sepeda motor dan berpura-pura membeli satu bungkus rokok.

Kurban yang tidak menaruh rasa curiga, langsung mengambalikan rokok sesuai permintaan pelaku. Namun ketika hendak memberikan rokok tersebut, pelaku langsung menodongkan senjata api karas pendek warna hitam mengancam "mana mangnya". Mendengar permintaan pelaku tersebut, korban kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang.

Awalnya korban didatangi tiga orang yang mengendari sepeda motor jenis Kawasaki Ninja dan

Terdakwa Janji Kembalikan Uang

yang terlihat. Salah satunya, PPTK (Pojat Pelaksana Teknis Kegiatan, ref), Hondi," ungkapnya.

Terungkap pula, uang yang dikorupsi dari proyek ini, sekitar Rp5,5 miliar digunakan untuk menutupi anggaran sejumlah proyek di Dishubun Inhil, tahun 2006 dan 2007. "Ada anggaran yang kurang pada proyek 2006 dan 2007. Supaya tidak menjadi tunuan, dikalihkan kesana anggaran," katanya lagi.

Dugaan Korupsi ini terjadi pada tahun 2008 saat Dishubun Inhil mencauskan rencana untuk mengidentifikasi kerusakan lahan dan hutan akibat pencemaran air laut melalui proyek ini dengan anggaran Rp10 miliar dan realisasi Rp9 miliar.

Belum Ada Bukti Kasut

Pravek yang dibangun ini selesai dalam tahap pembangunan, namun tanggul yang dibangun tidak dibangun sesuai kontrak hingga tidak bertahan lama. Dari audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan kerugian negara sebesar Rp5,4 miliar.

Mas-dugaan korupsi yang menjembunya, terdakwa dikenal pada 2007. "Ada informasi bahwa dia diinapkan dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHf. Ia juga dijilat pasal 2 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHf. (ad)

Sambungan dari hal. 21

kembalikan uang yang saya terima," ujar terdakwa kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, JPL Tebing.

Dalam dugaan korupsi ini, terdakwa mengakui menerima uang sebesar Rp1 miliar. "Uangunya saya terima bertahap melalui rekening. Dikirim oleh bendahara dinas," ujarnya menjelaskan korupsi proyek yang bernilai sekitar Rp9 miliar tersebut.

Terkait dengan itu, terdakwa mengaku sudah tak ingat lagi digunakan untuk apa. Selain dirinya, dikatakan terdakwa pula ada sekitar Rp2,5 miliar uang yang dibagikan ke beberapa pihak. "Untuk

Sambungan dari hal. 21

proyek yang dibangun ini selesai dalam tahap pembangunan, namun tanggul yang dibangun tidak dibangun sesuai kontrak hingga tidak bertahan lama. Dari audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan kerugian negara sebesar Rp5,4 miliar.

Mas-dugaan korupsi yang menjembunya, terdakwa dikenal pada 2007. "Ada informasi bahwa dia diinapkan dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHf. Ia juga dijilat pasal 2 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHf. (ad)

Sambungan dari hal. 21

oleh oknum petugas yang melakukan pungutan. Dugaan gratifikasi yang ada di jembatan timbang, terjadi dengan adanya dugaan mobil masuk yang tidak ditimbang dan dipungut uang. Hal ini coba dibuktikan oleh tim yang diturunkan ke lokasi, namun saat itu belum berhasil. Dalam penyelidikan, dokumen administrasi Dishub mengena laporan masuk di jembatan sudah dikumpulkan. Hasil pemeriksaan ini diharapkan dapat mengungkap apakah prosedur yang dilakukan sudah sesuai atau tidak. (ad)